



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang memuat Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional dan Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan.
- KETIGA : Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN  
PERIKANAN NASIONAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dan memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah sebagai modal bagi pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia cukup besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Meskipun kenaikan produksi perikanan selama ini masih dapat dipertahankan atau mungkin dapat ditingkatkan, namun tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih belum merata. Sebagian wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengalami lebih tangkap (*over fishing*) dan sebagian lagi masih belum termanfaatkan secara optimal. Selain itu pembangunan perikanan juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh wilayah nusantara. Disisi lain, perkembangan jumlah armada penangkapan ikan dalam rangka mendukung aktivitas penangkapan ini tidak terlepas dari adanya ketersediaan atau dukungan pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Keberadaan Pelabuhan perikanan sangat diperlukan guna menunjang aktivitas perikanan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Pelabuhan perikanan memiliki fungsi yang sangat strategis yang mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan

yang ...

yang mempunyai dampak (*multiplier effect*) berupa pengembangan perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja, serta pertahanan dan keamanan wilayah.

Untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang aktivitas perikanan diperlukan suatu perencanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang terencana, baik yang dilakukan oleh Kementerian, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan swasta, dengan memperhatikan daya dukung sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Perencanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) merupakan amanat Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan atau pedoman bagi Kementerian, pemerintah daerah, dan swasta dalam menyelenggarakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan agar dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional adalah terwujudnya kepatuhan oleh Kementerian, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan perikanan.

## C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional mencakup kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional.

## D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

2. Rencana ...

2. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN, adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan.
3. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Perikanan Tangkap.
10. Gubernur adalah kepala daerah provinsi beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
11. Bupati/Wali kota adalah kepala daerah kabupaten/kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

## BAB II KEBIJAKAN PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

Visi pembangunan nasional Tahun 2005–2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui salah satu misi pembangunan nasional yang menitikberatkan pada sektor kelautan yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Terjemahan implementasi dari misi ini adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka kebijakan nasional pembangunan terkait bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lebih difokuskan pada:

- a. pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui:
  - 1) pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
  - 2) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
- b. percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dicapai melalui:
  - 1) memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; dan
  - 2) meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.
- c. peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat dicapai melalui:
  - 1) peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian/perikanan;
  - 2) pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - 3) pengembangan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah.

Salah ...

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan nasional pembangunan adalah melalui pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan sebagai tempat kegiatan perikanan bagi nelayan dan operasional kapal perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Operasional pelabuhan perikanan dilakukan untuk melayani kebutuhan nelayan dan kapal perikanan, aktivitas pengolahan dan pemasaran produk perikanan, aktivitas perbaikan kapal dan jasa terkait lainnya.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan pemasaran produk perikanan, pelabuhan perikanan dibangun secara bertahap melalui proses perencanaan yang mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah, potensi sumber daya ikan, daya dukung sumberdaya manusia, wilayah pengelolaan perikanan, dukungan prasarana wilayah, kondisi perairan dan geografis daerah serta sosial ekonomi masyarakat.

Mengingat arti pentingnya pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan dalam mendukung pembangunan nasional, kebijakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan difokuskan pada:

- a. pemenuhan pelayanan masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan nelayan;
- b. lingkaran luar wilayah kepulauan Indonesia (*Outer Ring Fishing Port*) dan daerah perbatasan;
- c. konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan;
- d. peningkatan daya saing produk hasil perikanan agar dapat menyediakan kualitas hasil perikanan yang memenuhi standar mutu;
- e. mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
- f. peningkatan kerja sama lintas sektor dan swasta dalam pembangunan pelabuhan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pelabuhan perikanan nasional tersebut, perlu disusun arah pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional yang menjadi acuan atau panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

#### A. Arah Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pelabuhan perikanan nasional, arah pembangunan pelabuhan perikanan difokuskan pada:

1. Pembangunan ...

1. Pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi, dengan strategi:
  - a. pemenuhan tahapan perencanaan mulai dari studi kelayakan (*feasibility study*), rencana induk pelabuhan perikanan (*master plan*), dan desain rinci (*detail design*);
  - b. pemilihan lokasi pembangunan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi; dan
  - c. pemenuhan fasilitas dasar pelabuhan perikanan agar dapat operasional.
2. Pembangunan pelabuhan perikanan di lingkaran luar wilayah kepulauan Indonesia (*Outer Ring Fishing Port*) dan daerah perbatasan, dengan strategi:
  - a. pemenuhan pentahapan perencanaan mulai dari studi kelayakan (*feasibility study*), rencana induk pelabuhan perikanan (*master plan*), dan desain rinci (*detail design*);
  - b. pemilihan lokasi pembangunan prioritas yang disesuaikan dengan lokasi *Outer Ring Fishing Port* dan daerah perbatasan; dan
  - c. pemenuhan fasilitas dasar pelabuhan perikanan agar dapat operasional.
3. Konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan dengan strategi integrasi sistem informasi antar pelabuhan perikanan.
4. Pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, dengan strategi:
  - a. penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan; dan
  - b. penerapan prinsip perikanan yang berwawasan lingkungan/*eco-fishing port*.
5. Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan strategi:
  - a. penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan; dan
  - b. penguatan sistem pencatatan pendaratan ikan.
6. Kerja sama pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan dengan instansi kementerian terkait, pemerintah daerah dan swasta, dengan strategi:
  - a. sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah dalam pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan;
  - b. sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan; dan
  - c. sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan fasilitas komersial.

B. Arah ...



## B. Arah Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka mendukung arah pembangunan pelabuhan perikanan diperlukan upaya pengembangan aktivitas pelabuhan perikanan agar dapat meningkatkan operasional dan pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut, arah pengembangan pelabuhan perikanan yang difokuskan pada:

1. Mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi dengan rencana pengembangan:
  - a. melakukan kerjasama dan memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan maupun swasta untuk melakukan investasi di pelabuhan perikanan; dan
  - b. pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis pada peningkatan kualitas produk perikanan di pelabuhan perikanan.
2. Pelabuhan perikanan di lingkaran luar wilayah kepulauan Indonesia (*Outer Ring Fishing Port*) dan daerah perbatasan dengan rencana pengembangan:
  - a. pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis pada peningkatan kualitas produk perikanan di pelabuhan perikanan; dan
  - b. pengembangan fasilitas ekspor di pelabuhan perikanan.
3. Konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan dengan rencana pengembangan integrasi sistem informasi antar pelabuhan perikanan terkait dengan pemasaran baik lokal maupun ekspor.
4. Pengembangan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, dengan rencana pengembangan:
  - a. pendekatan *Environmental Management System* (EMS) dalam operasional pelabuhan perikanan; dan
  - b. penerapan prinsip-prinsip ISO 14001 pada lingkungan dan fasilitas pelabuhan perikanan, perusahaan pengolahan, dan masyarakat pengguna.
5. Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan rencana pengembangan:
  - a. pengembangan sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan; dan
  - b. pengembangan sistem monitoring dan pendataan pendaratan ikan di pelabuhan perikanan.
6. Kerja sama pembiayaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan dengan instansi/kementerian terkait, pemerintah daerah dan swasta.

BAB III  
RENCANA LOKASI PELABUHAN PERIKANAN

A. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional diperlukan rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional yang mempertimbangkan:

1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional salah satunya memuat rencana lokasi. Penyusunan rencana lokasi mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan rencana lokasi yang digunakan adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional, mengingat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum seluruhnya diimplementasikan/disusun oleh pemerintah daerah.

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan potensi sumber daya ikan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dibagi ke dalam 11 (sebelas) WPPNRI.

Potensi atau ketersediaan sumber daya ikan di suatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. Potensi sumber daya ikan menentukan kapasitas penangkapan (*fishing capacity*) atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas pelabuhan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya.

Adapun lokasi WPPNRI dan potensi sumber daya ikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

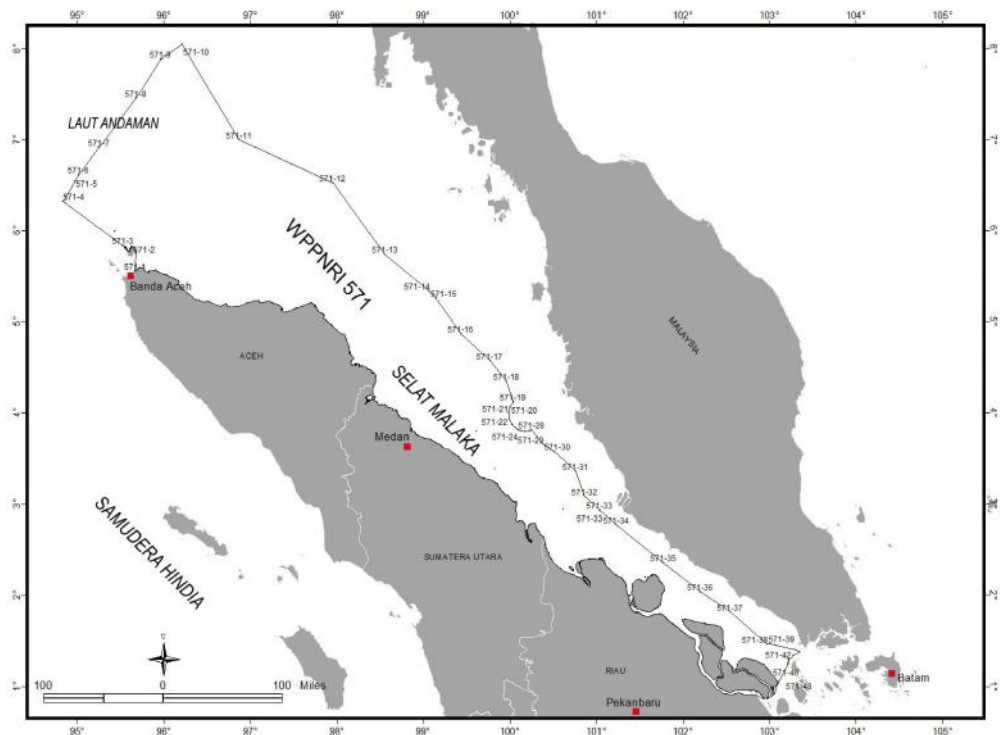
- 1) Lokasi

Selat Malaka merupakan salah satu wilayah perairan yang sangat penting bagi lalu lintas berbagai komoditi termasuk komoditas perikanan dari negara-negara ASEAN. Perairan ini telah lama diidentifikasi sebagai wilayah perairan padat nelayan. Aktivitas

eksploitasi ...

eksploitasi sumber daya perikanan dilakukan secara intensif baik oleh nelayan konvensional maupun modern.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 571 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

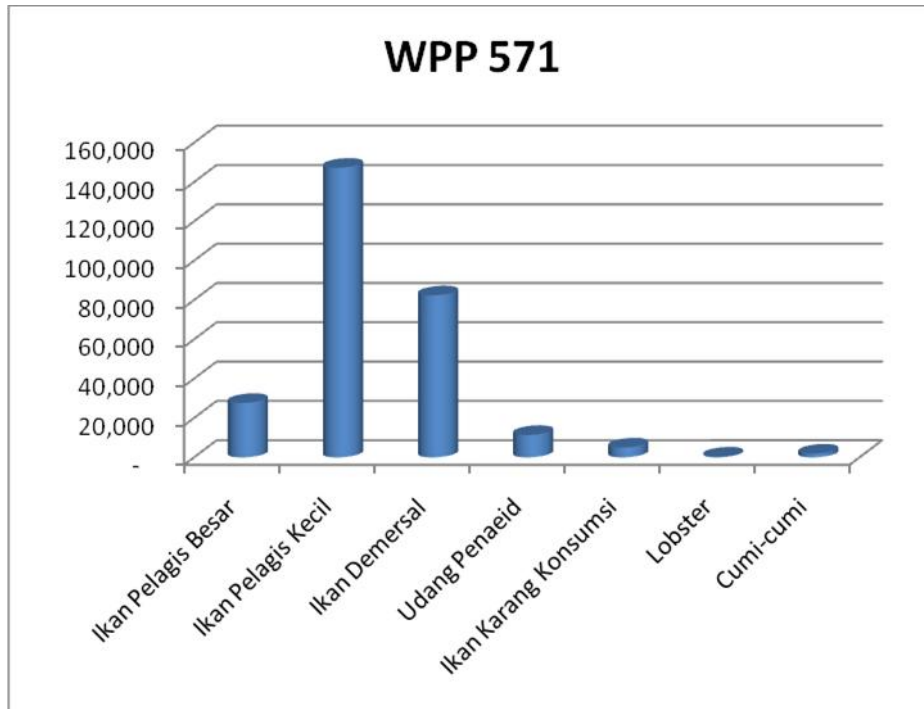


Gambar 1. Lokasi WPPNRI 571

## 2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 147,300 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPP-NRI 571 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2 ...



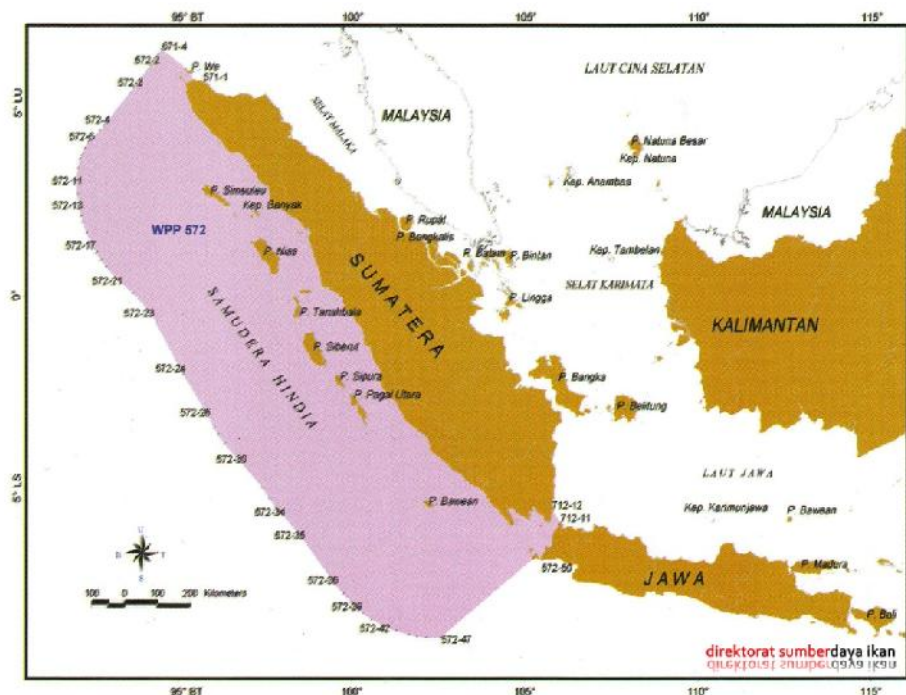
Gambar 2. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan WPPNRI 571

b. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda

1) Lokasi

Wilayah Samudra Hindia bagian barat Sumatera pada umumnya merupakan perairan laut dalam, hanya sebagian kecil saja yang mempunyai kedalaman di bawah 200 (dua ratus) meter, pengaruh massa *air oceanic* sangat dominan pada WPPNRI 572.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 572 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:

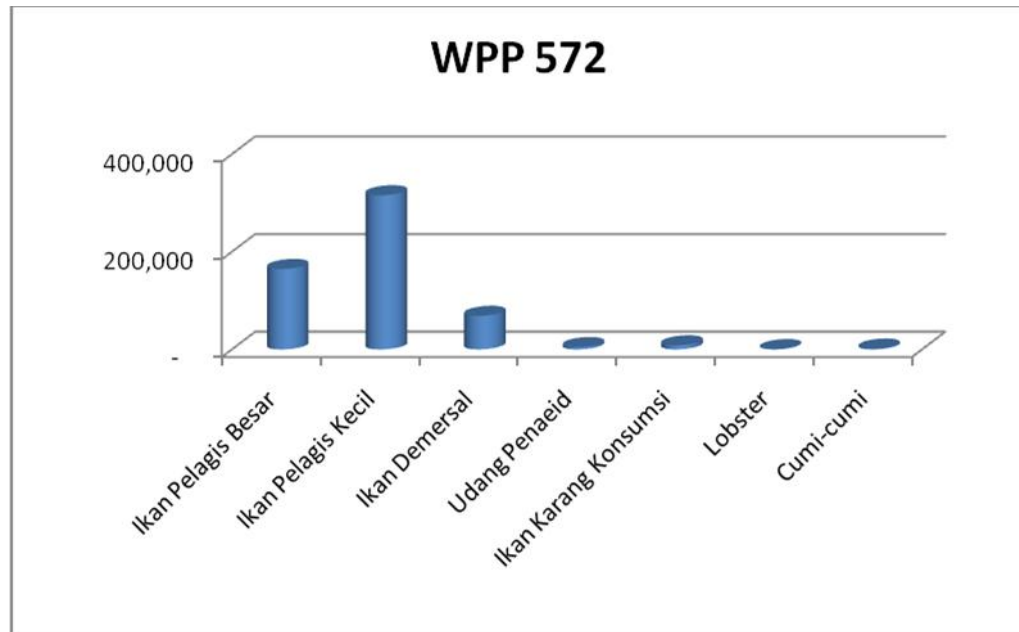


Gambar 3. Lokasi WPPNRI 572

2) Potensi ...

## 2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 572 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 315,900 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 572 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan WPPNRI 572

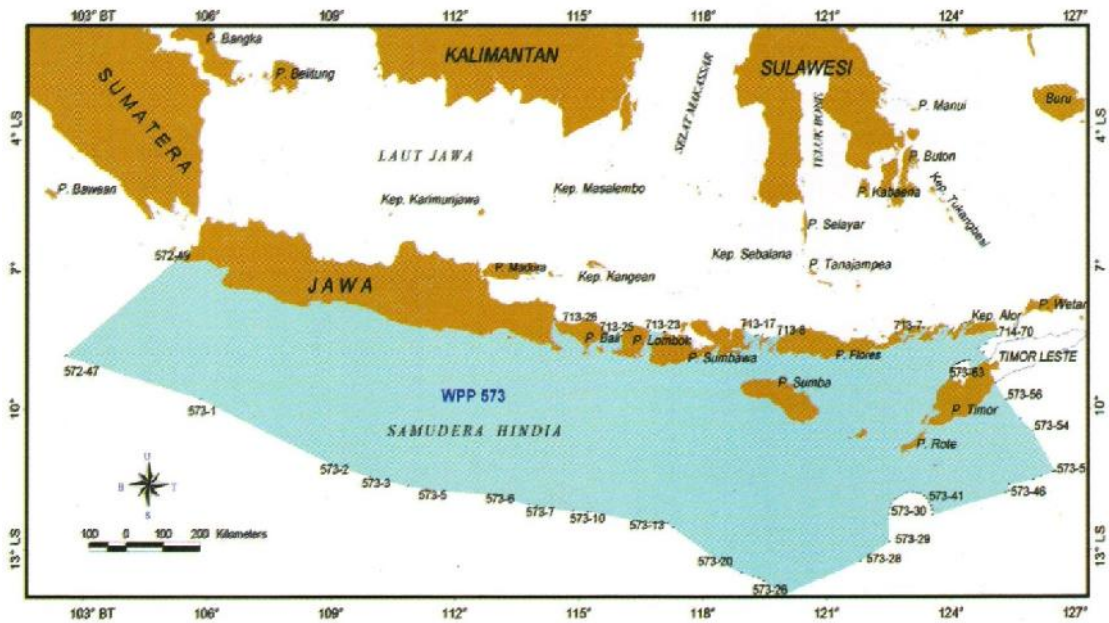
- c. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat

### 1) Lokasi

Seperti halnya Wilayah Samudra Hindia bagian barat Sumatera pada umumnya WPP ini merupakan perairan laut dalam, hanya sebagian kecil saja yang mempunyai kedalaman di bawah 200 (dua ratus) meter, pengaruh massa *air oceanic* sangat dominan pada WPP ini.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 573 dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:

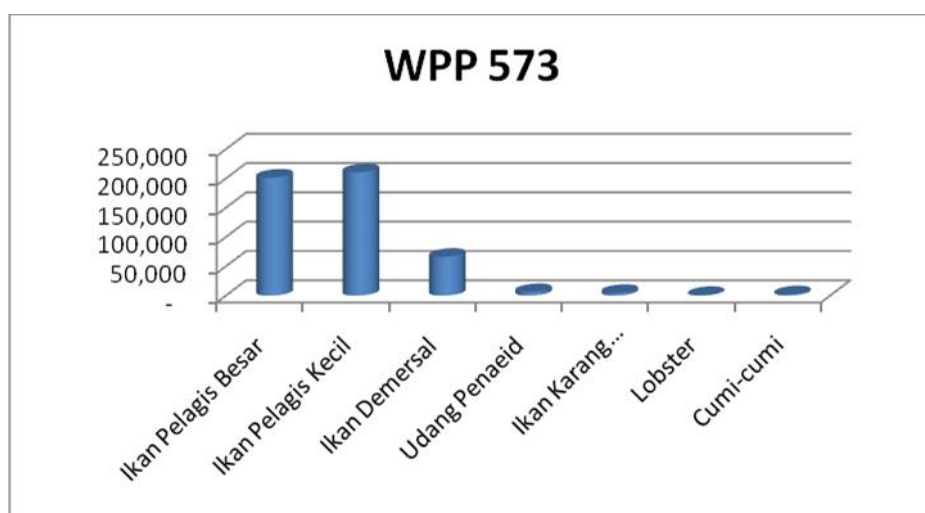
Gambar 5 ...



Gambar 5. Lokasi WPPNRI 573

2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 210,600 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini:



Gambar 6. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573

d. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan

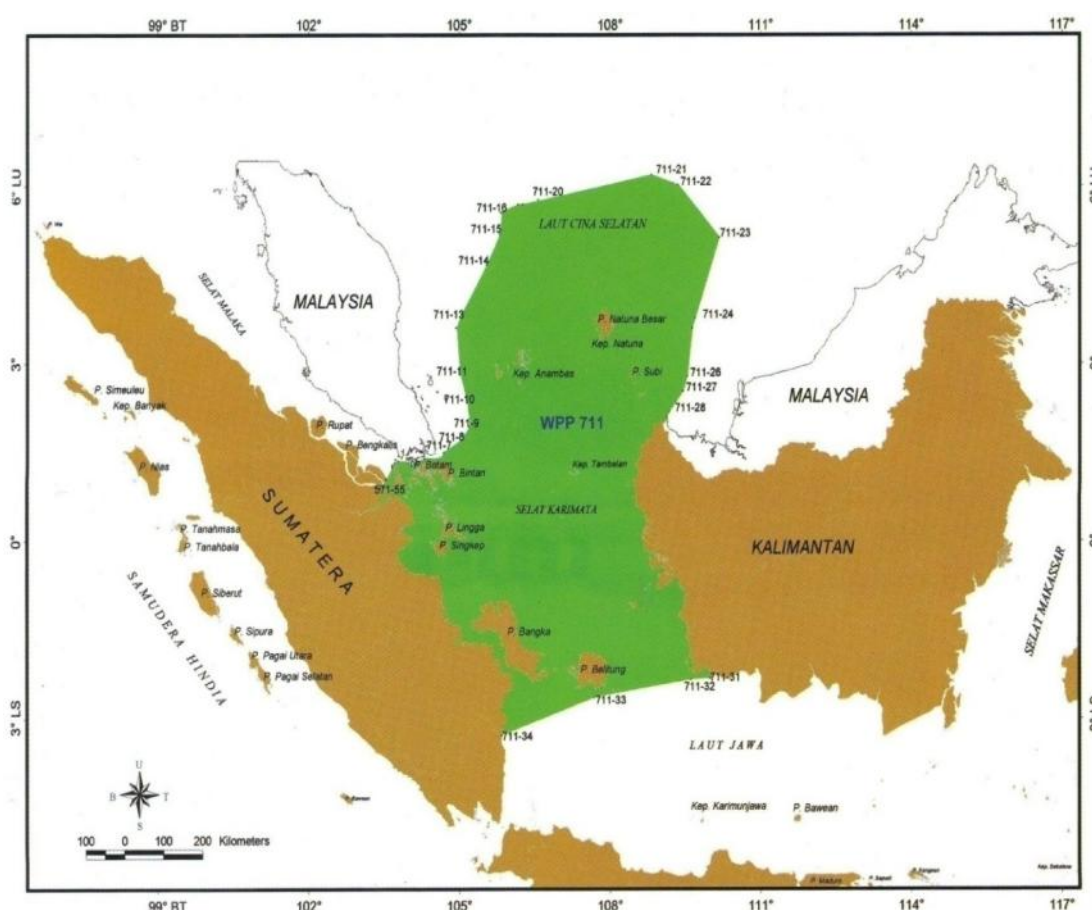
1) Lokasi

Secara geografis, perairan Laut China Selatan memiliki arti strategis baik ditinjau dari sumber daya yang dikandung maupun dari segi lalu lintas ...

lintas pelayaran serta memiliki wilayah perbatasan dengan 4 (empat) negara yaitu: Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perbatasan melalui berbagai usaha perikanan selain dapat meningkatkan aspek kesejahteraan juga keamanan. Dengan aspek kesejahteraan, dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan, sedangkan aspek keamanan adalah meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan perbatasan tersebut.

Perairan Laut China Selatan merupakan bagian dari Paparan Sunda yang relatif dangkal dengan rata-rata kedalaman perairan 70 (tujuh puluh) meter, pada dasar relatif rata dan produktivitas perairan sangat dipengaruhi oleh musim. Sekitar sepertiga luas perairan termasuk ke dalam perairan teritorial dan ZEE Indonesia. Luas perairan Laut China Selatan yang masuk wilayah Indonesia diestimasi sekitar 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu) km<sup>2</sup>.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 711 dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini:



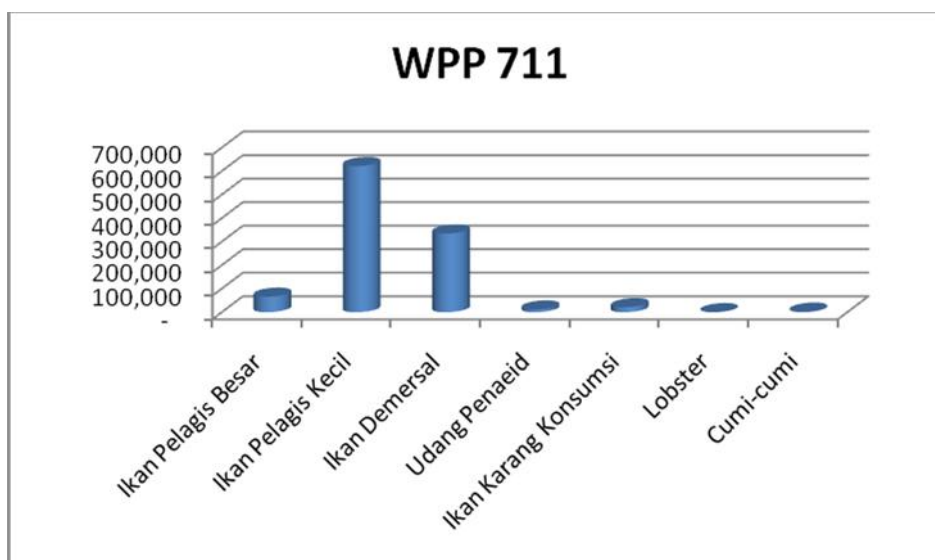
Gambar 7. Lokasi WPPNRI 711

## 2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,

penetapan ...

penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 621,500 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini:



Gambar 8. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711

e. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa

1) Lokasi

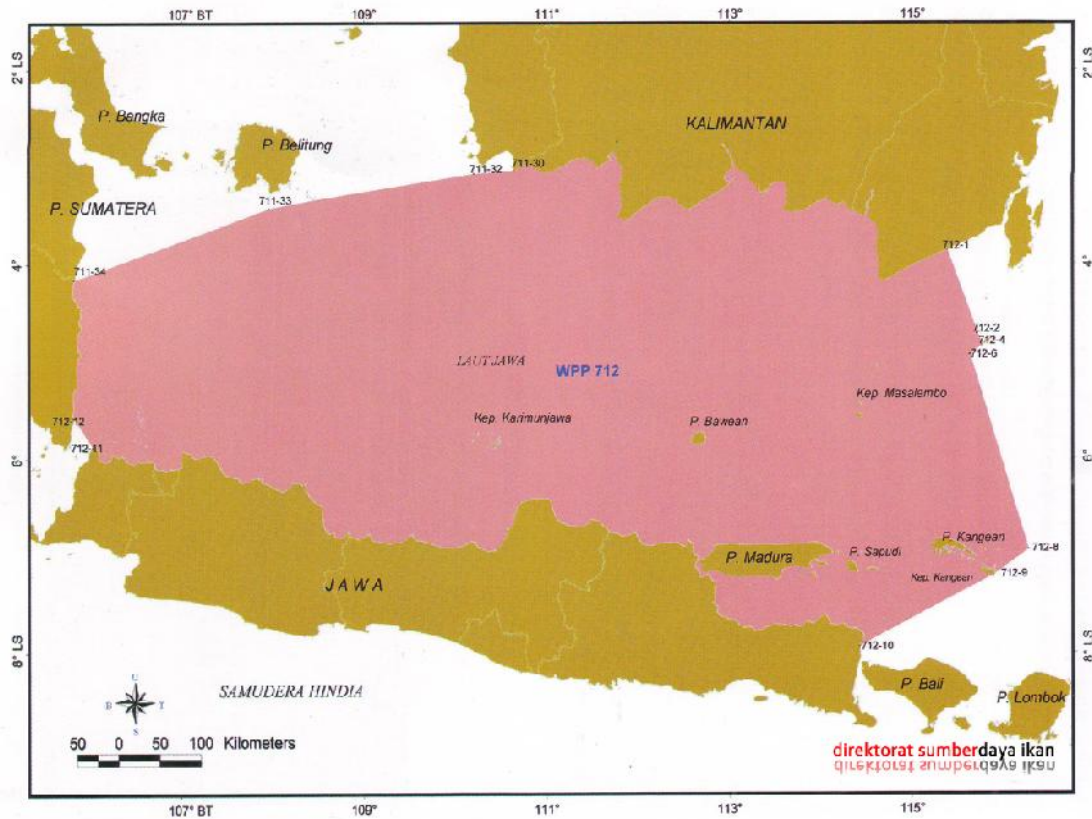
Sumber daya ikan demersal dieksploitasi dengan cepat setelah introduksi alat penangkapan ikan *trawl* akhir tahun 1960. Perkembangan alat penangkapan ikan tersebut merupakan penyebab utama penurunan stok ikan demersal, pelarangan alat penangkapan ikan *trawl* memberikan dampak kepada berkembangnya alat penangkapan ikan tradisional yang dianggap efektif untuk menangkap udang dan ikan demersal. Beberapa jenis alat penangkapan ikan untuk udang dan ikan demersal telah dimodifikasi setelah penemuan penggunaan gardan (tahun 1987) untuk menarik jaring. Cantrang menggunakan *danleno* (bahan bambu) untuk pembukaan mulut jaring secara vertikal, jaring arad dilengkapi dengan sepasang alat pembuka mulut yaitu *sewakan* (*otter board*) yang terbuat dari papan dan pemberat besi, cotok yang menggunakan gawang (*beam*), dan jaring *trammel net* yang cara pengoperasian ditarik oleh 2 (dua) perahu.

Sumber daya ikan pelagis telah lama dieksploitasi oleh berbagai alat penangkapan ikan, salah satunya adalah payang. Payang (*danish seine*) telah beroperasi di dekat pantai utara Laut Jawa dari Kepulauan Seribu (Jakarta) sampai dengan Kepulauan Kangean di bagian timur Laut Jawa pada awal abad 19. Sejak tahun 1970-an, perkembangan eksploitasi sumber daya ikan pelagis kecil di Laut Jawa sangat erat kaitannya



dengan perkembangan alat penangkapan ikan pukat cincin. Pasca pelarangan pukat harimau tahun 1980, perikanan pukat cincin berkembang menjadi semi industri, yang dicirikan dengan peningkatan kapasitas penangkapan yang meliputi ukuran dan kekuatan mesin kapal, perluasan daerah penangkapan ikan, serta perubahan taktik penangkapan ikan dari rumpon digantikan dengan penggunaan cahaya sebagai alat bantu pengumpul ikan.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 712 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini:

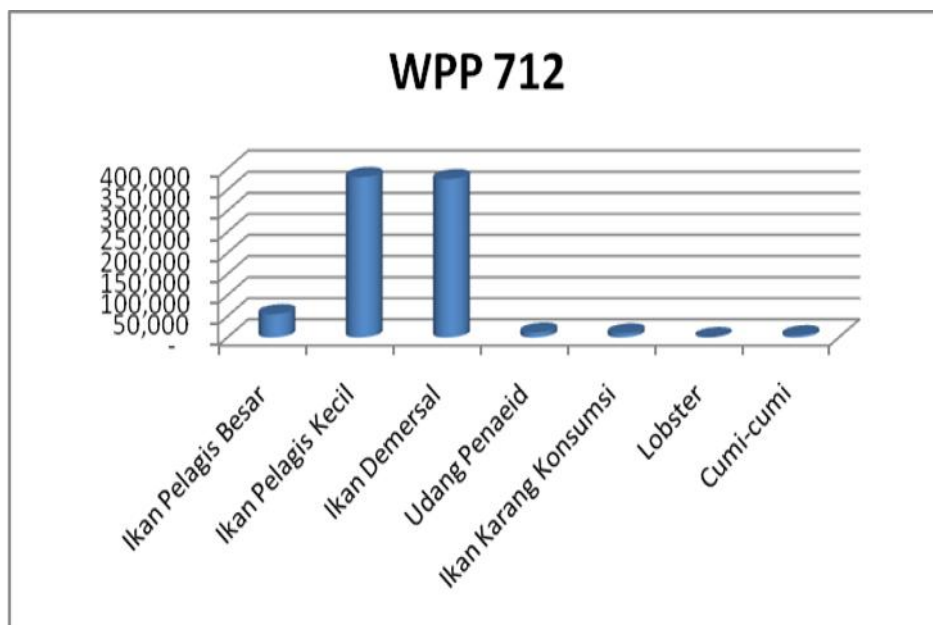


Gambar 9. Lokasi WPPNRI 712

## 2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 712 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 380,000 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 712 dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini:

Gambar 10 ...



Gambar 10. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 712

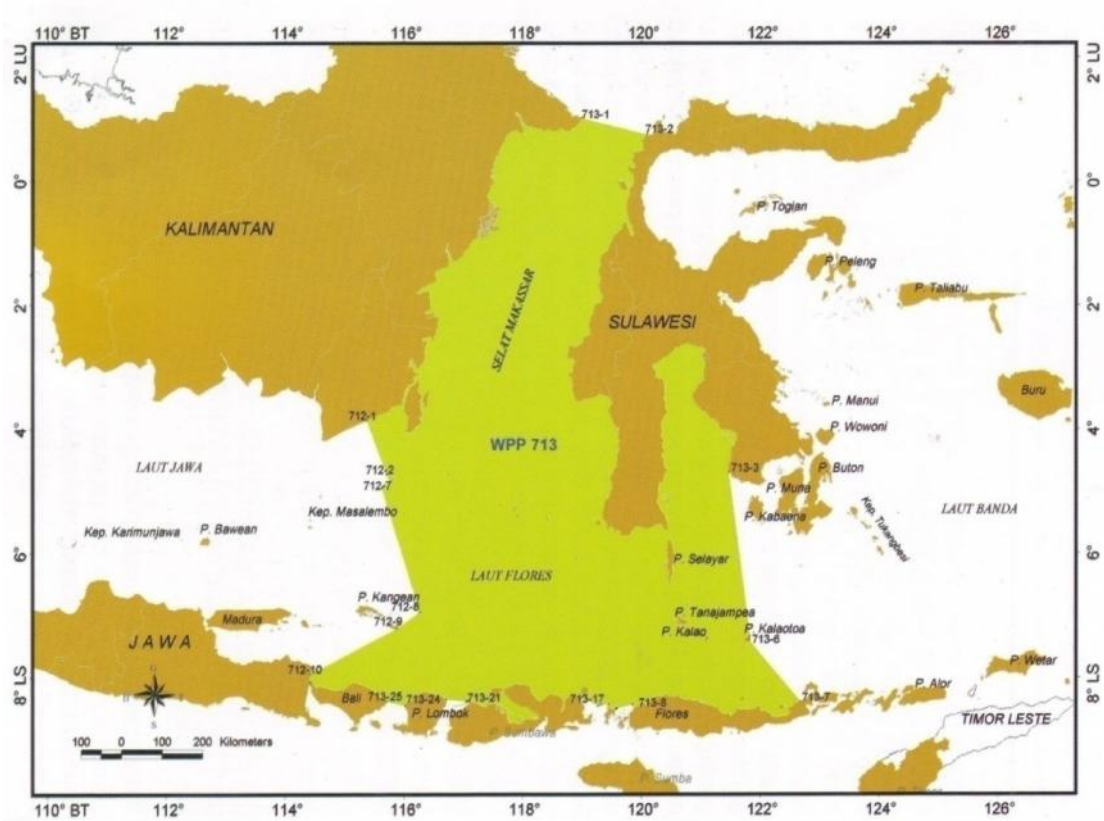
- f. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

1) Lokasi

Perairan selat Makassar merupakan wilayah yang memiliki karakteristik habitat yang sangat spesifik dengan kompleksitas masalah yang relatif tinggi dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan, untuk itu yang menjadi permasalahan potensial yaitu kelangkaan informasi di wilayah ini akan merupakan kendala dalam menyusun informasi yang menyeluruh bagi pengembangan penangkapan ikan dan usaha perikanan yang baru. Dalam hal ini wilayah pengelolaan perairan Selat Makassar, meliputi perairan bagian paling utara yaitu perairan Laut Tarakan dan Nunukan sampai dengan bagian paling selatan yang terletak di bagian perairan barat Sulawesi Selatan di Selat Makassar sampai dengan perairan Laut Flores.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 713 dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini:

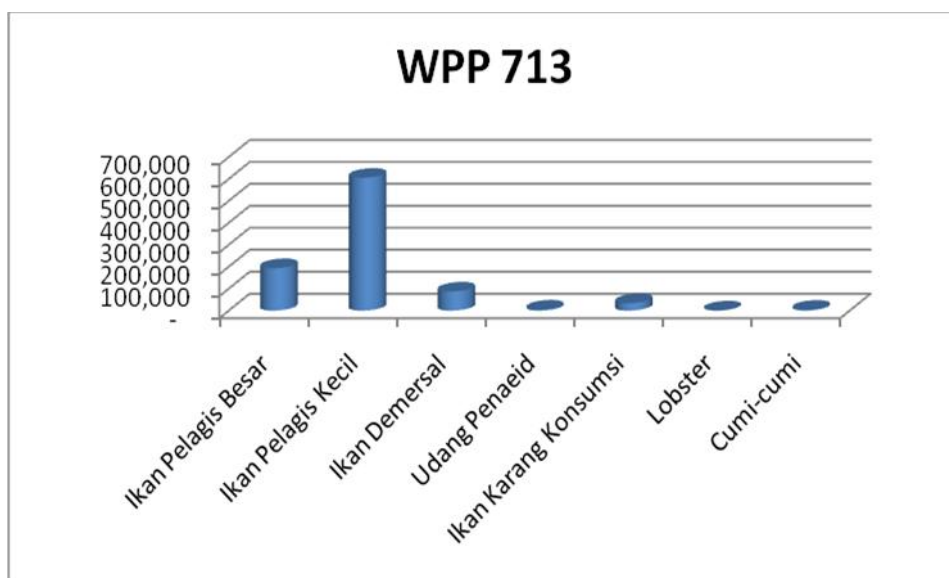
Gambar 11 ...



Gambar 11. Lokasi WPPNRI 713

2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 605,400 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini:



Gambar 12. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan WPPNRI 713

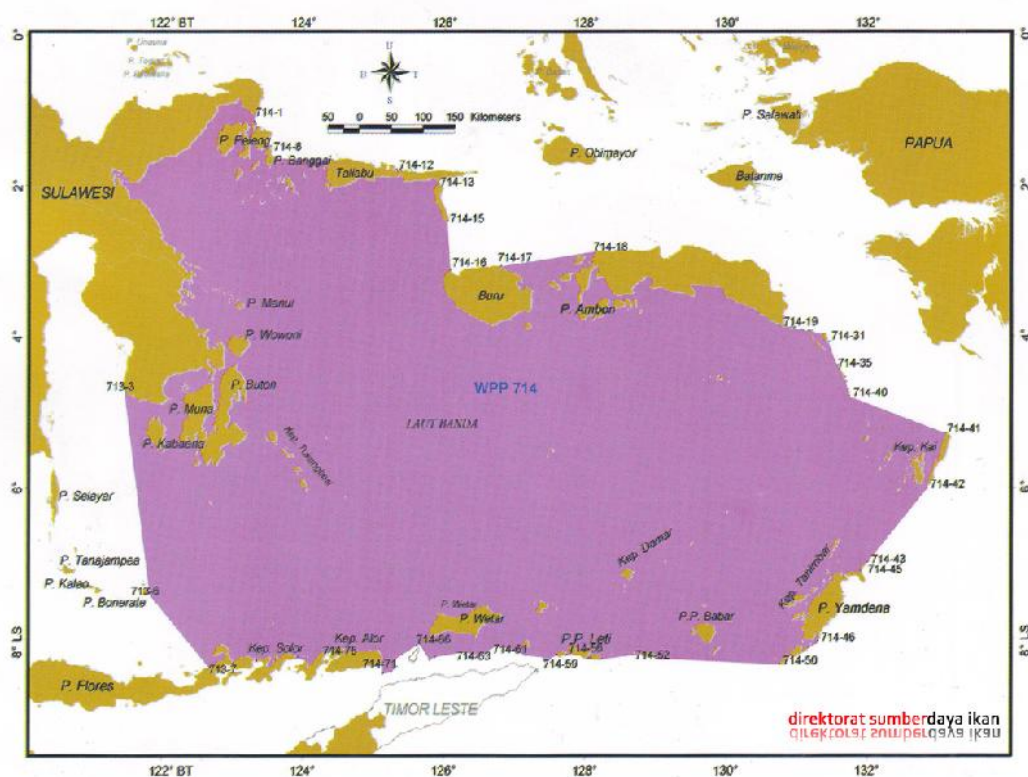
g. WPPNRI ...

g. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

1) Lokasi

Laut Banda sebagai kesatuan ekosistem merupakan perpaduan dari 3 (tiga) keistimewaan yaitu merupakan laut kontinen yang sempit, memiliki perairan oseanik (laut dalam) dan terletak di daerah tropis. Dengan demikian menghasilkan kondisi oseanografi sangat dinamis dan secara hidrografis memberikan sifat-sifat ekologis yang sangat menguntungkan bagi habitat ikan pelagis terutama ikan tuna dan cakalang. Kondisi ekologis yang menguntungkan itu antara lain ditopang oleh massa air samudera, suhu yang hangat dan ketersediaan pakan melimpah pada lahan yang relatif sempit.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 714 dapat dilihat pada Gambar 13 berikut ini:

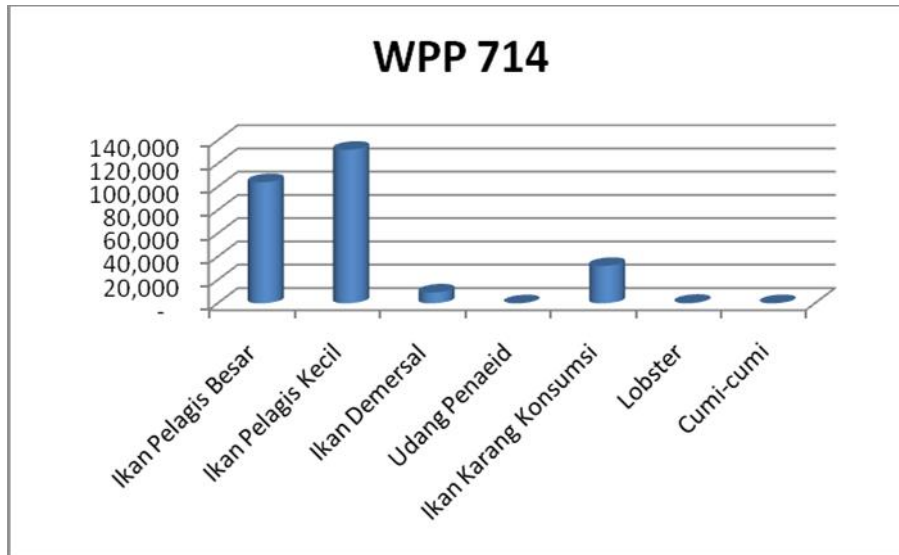


Gambar 13. Lokasi WPPNRI 714

2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 714 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 132,000 ton, sedangkan produksi terkecil adalah udang panaeid, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 714 dapat dilihat pada Gambar 14 berikut ini:

Gambar 14 ...



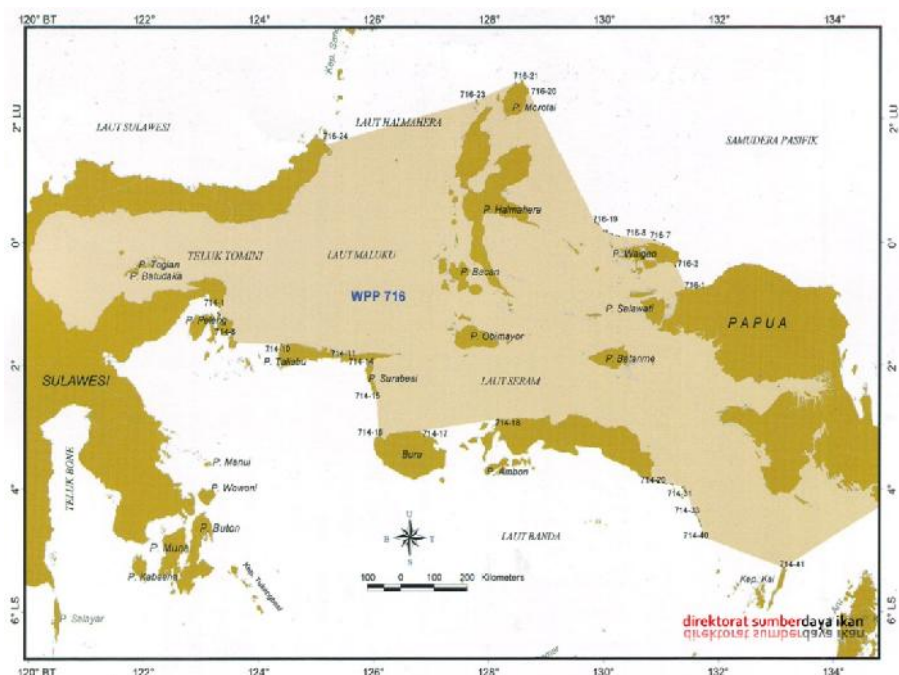
Gambar 14. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 714

h. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau

1) Lokasi

Teluk Tomini adalah perairan di Sulawesi yang bersifat oseanik (laut dalam) dengan kedalaman rata-rata lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) meter dan luas perairan sekitar 59.500 km<sup>2</sup>. Bentuk teluk sebagai corong terbuka ke arah timur dan berhubungan langsung dengan Laut Maluku, Teluk Tolo, dan Laut Sulawesi. Nilai ekonomis dari sumber daya perikanan tersebut telah mendorong eksploitasi oleh nelayan setempat. Peningkatan eksploitasi dapat mengakibatkan perubahan pada sumber daya dan mendorong konsekuensi ke arah turun sediaan, penurunan hasil tangkapan, serta penurunan kualitas lingkungan.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 715 dapat dilihat pada Gambar 15 berikut ini:

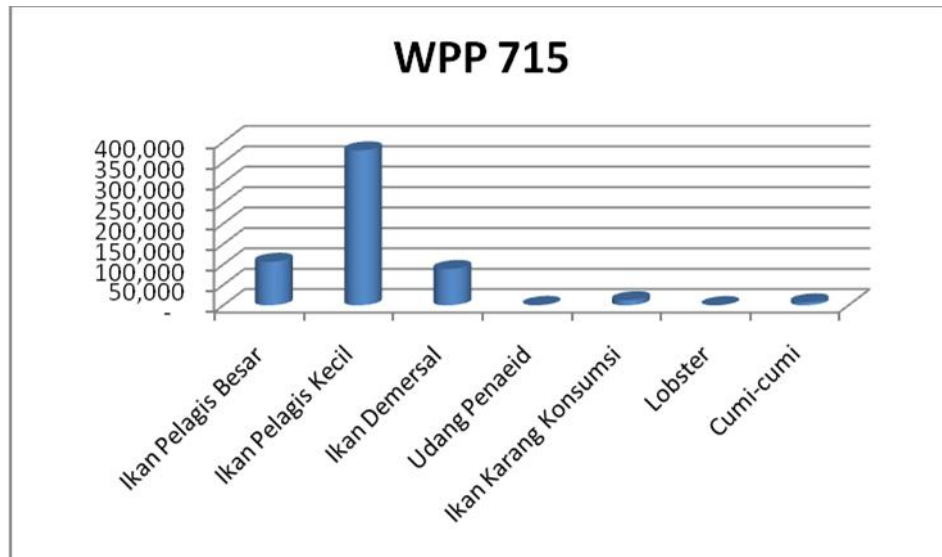


Gambar 15. Lokasi WPPNRI 715

2) Potensi ...

## 2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 715 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 379,400 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 715 dapat dilihat pada Gambar 16 berikut ini:



Gambar 16. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 715

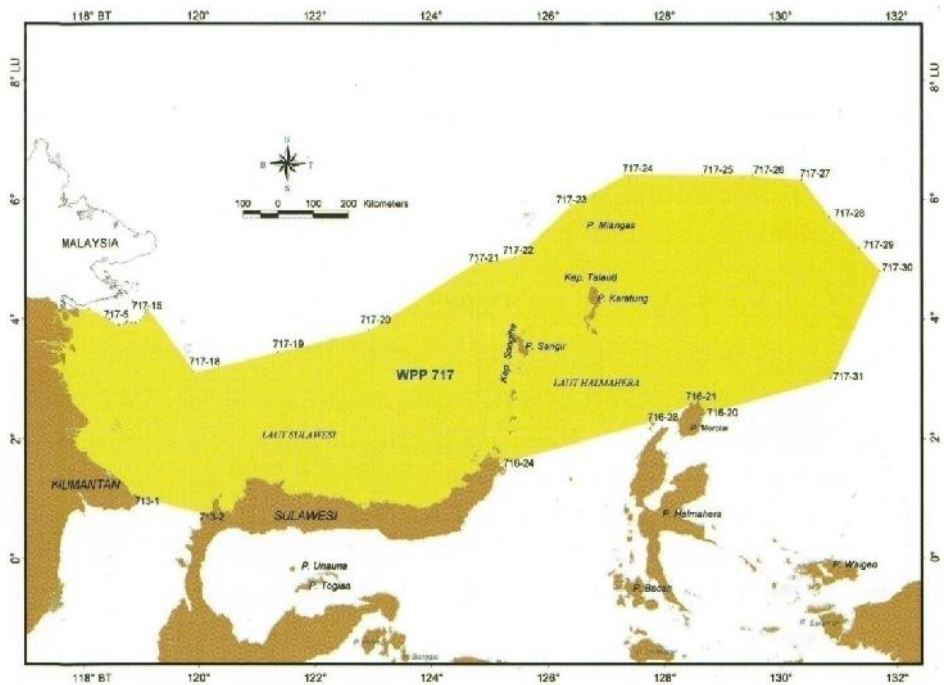
### i. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera

#### 1) Lokasi

Perairan Sulawesi Utara dan sekitar adalah merupakan salah satu daerah penangkapan ikan tuna dan cakalang yang terpenting di kawasan timur Indonesia. Perikanan tuna dan cakalang di kawasan ini berkembang sejak didirikan perusahaan-perusahaan negara yang berkecimpung dalam penangkapan ikan tuna dan cakalang menggunakan alat tangkap *pole and line* (huhate). Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan di Aer Tembaga atau Bitung, Sulawesi Utara, Ambon, dan Sorong pada tahun 1973-an.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 716 dapat dilihat pada Gambar 17 berikut ini:

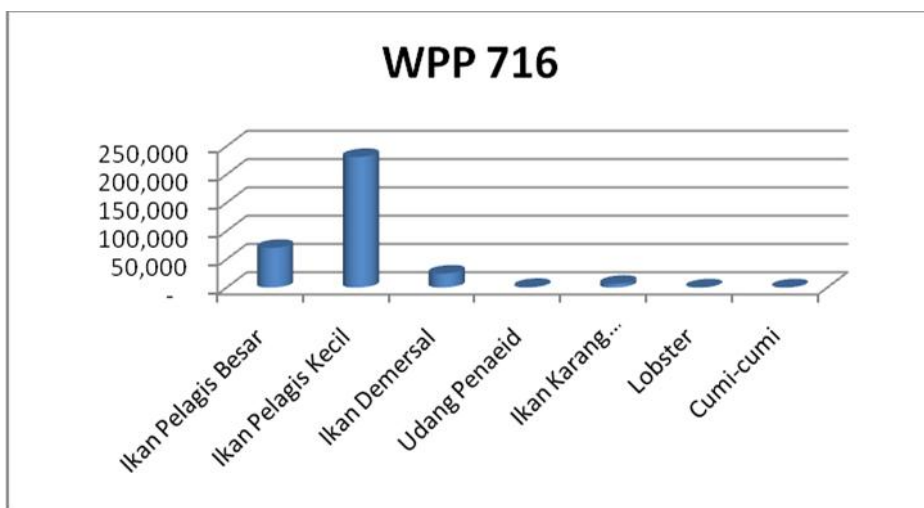
Gambar 17 ...



Gambar 17. Lokasi WPPNRI 716

2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya di WPPNRI 716 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 230,900 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster dan cumi-cumi, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 716 dapat dilihat pada Gambar 18 berikut ini:



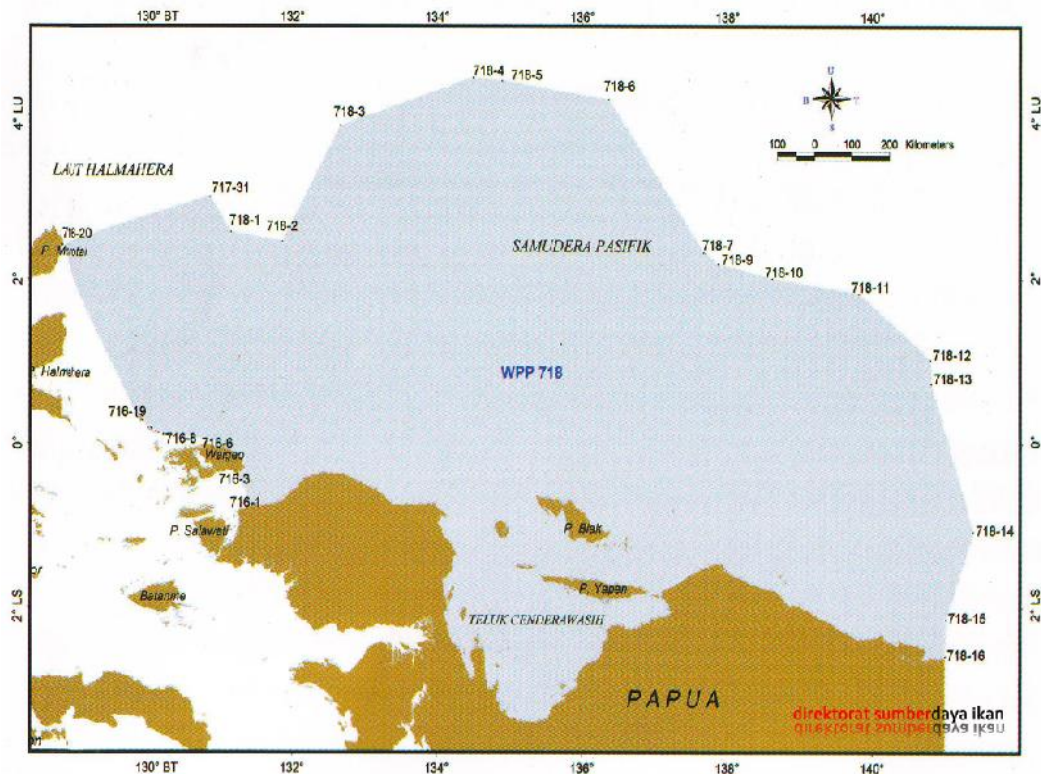
Gambar 18. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 716

j. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

1) Lokasi

Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik sebagian besar meliputi perairan laut lepas yang terbuka dimana sangat dipengaruhi oleh massa air oseanik, perairan dangkal adalah relatif sempit. Seperti halnya perairan Laut Sulawesi dan Utara halmahera perairan ini pun merupakan daerah penangkapan Tuna dan Cakalang.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 717 dapat dilihat pada Gambar 19 berikut ini:



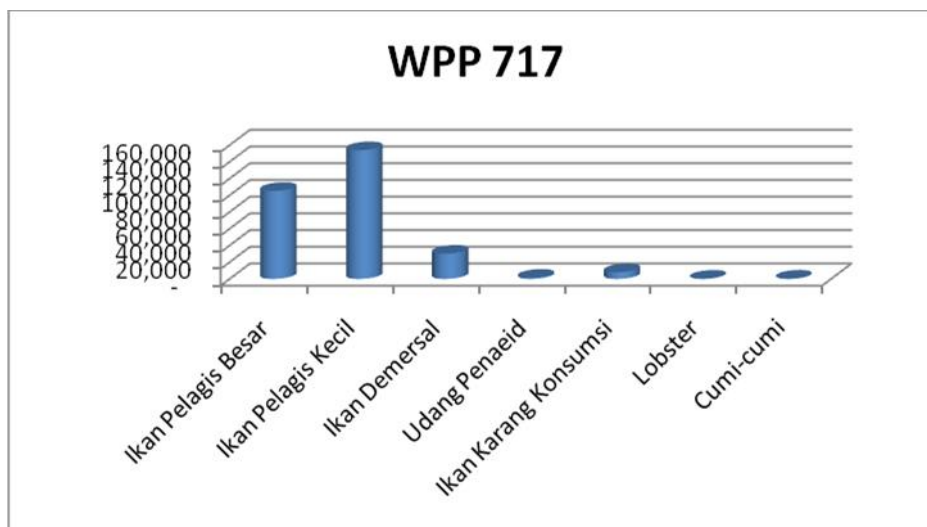
Gambar 19. Lokasi WPPNRI 717

2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 153,900 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717 dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20 ...





Gambar 20. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717

k. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur

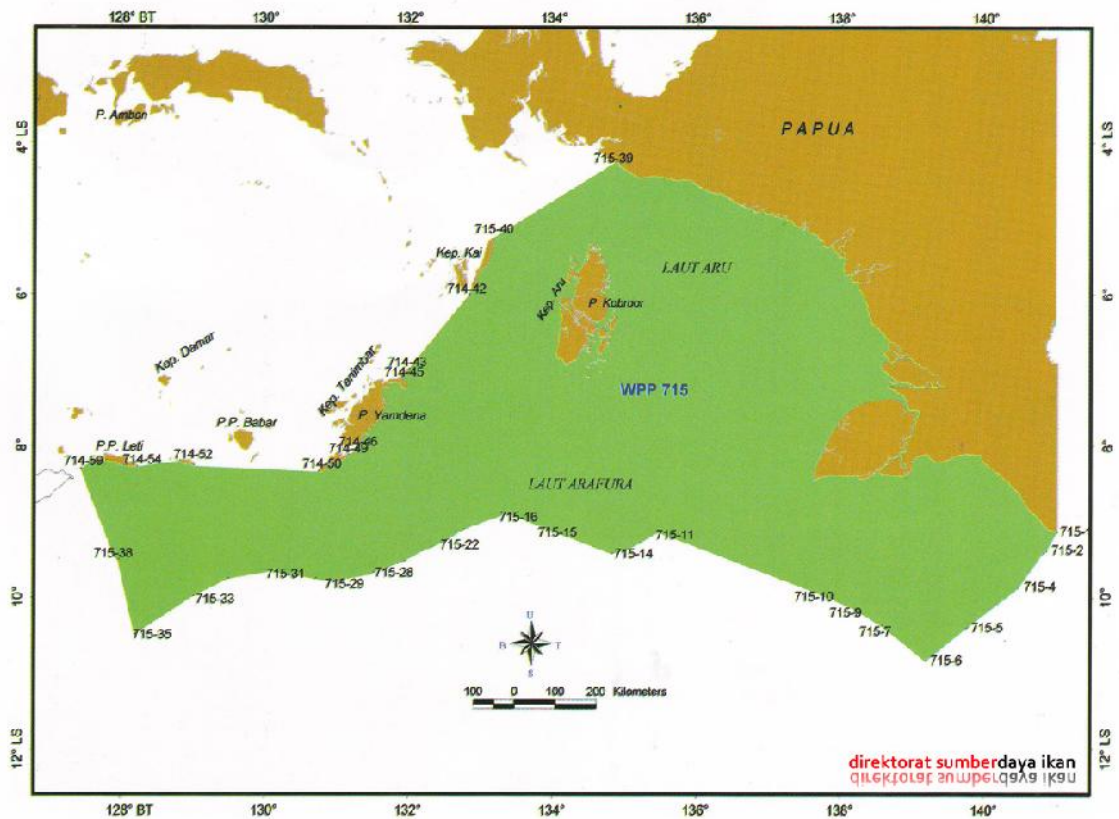
#### 1) Lokasi

Secara administratif, perairan Laut Arafura termasuk dalam wilayah Propinsi Papua dan sebagian termasuk wilayah Propinsi Maluku, terutama yang berada di sekitar Kepulauan Aru. Perairan ini sebagian besar termasuk wilayah ZEE Indonesia yang langsung berhubungan dengan Laut Timor dan Laut Banda. Di sebelah utara, sirkulasi massa air sangat dipengaruhi oleh Samudera Pasifik. Kedalaman Laut Arafura berkisar antara 5 meter sampai dengan 60 meter atau rata-rata 30 meter dengan lapisan tebal berupa lumpur dan sedikit pasir yang mencakup hampir 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah perairan. Perairan Laut Arafura dan sebagian Maluku merupakan salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang potensial. Usaha penangkapan udang di perairan Laut Arafura dan sekitarnya sudah sejak lama dilakukan, dimulai oleh perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang yang berpangkalan di Sorong dan Ambon.

Daerah penangkapan ikan dan udang di wilayah perairan selatan Papua secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1) daerah penangkapan perikanan rakyat; 2) daerah penangkapan telur ikan torani; 3) daerah penangkapan *trawl* udang; dan 4) daerah penangkapan ikan komersial seperti *fish net* dan *gill net* hanyut.

Kawasan yang termasuk WPPNRI 718 dapat dilihat pada Gambar 21 berikut ini:

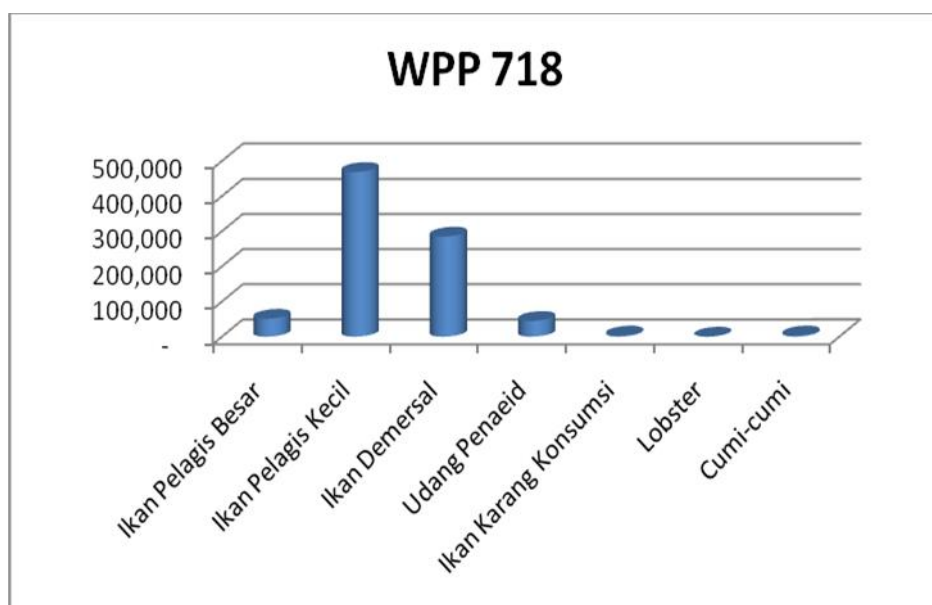
Gambar 21 ...



Gambar 21. Lokasi WPPNRI 718

## 2) Potensi sumber daya ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 718 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 468,700 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster, secara lebih jelas gambaran estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 718 dapat dilihat pada Gambar 22 berikut ini:



Gambar 22. Grafik estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 718

### 3. Daya dukung sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk terlibat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas atau klasifikasi pelabuhan perikanan, yaitu:

#### a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Untuk kriteria PPS, kapal perikanan umumnya beroperasi di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas dengan kolam perairan yang dapat menampung kapal perikanan paling sedikit 100 (seratus) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 6000 (enam ribu) GT, sehingga dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit 2.300 (dua ribu tiga ratus) orang yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan perikanan.

#### b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Untuk kriteria PPN, kapal perikanan umumnya beroperasi di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan kolam perairan yang dapat menampung kapal perikanan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) GT, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit 825 (delapan ratus dua puluh lima) orang yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan perikanan.

#### c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Untuk kriteria PPP, kapal perikanan umumnya beroperasi di perairan Indonesia dengan kolam perairan yang dapat menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) GT, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit 210 (dua ratus sepuluh) orang yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan perikanan.

#### d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Untuk kriteria PPI, kapal perikanan umumnya beroperasi di perairan Indonesia dengan kolam perairan yang dapat menampung kapal perikanan paling sedikit 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) GT, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan perikanan.

### 4. Dukungan prasarana wilayah

Dalam pembangunan pelabuhan perikanan dibutuhkan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah

yang harus ada sebelumnya, antara lain: fasilitas pokok/utama seperti jalan, jembatan, gedung/bangunan dan sebagainya; serta fasilitas fungsional dan penunjang yang terkait langsung dengan pelabuhan perikanan seperti listrik, air bersih dan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah akan mempermudah dan mempercepat pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan.

#### 5. Geografis daerah dan kondisi perairan

Kondisi geografis daerah antara lain: kondisi lahan, kerentanan terhadap bencana, dan jarak akses terhadap pasar. Sedangkan kondisi perairan mencakup antara lain: batimetri perairan, tinggi gelombang, pasang surut, kecepatan arus, ruang gerak kapal, dan sedimentasi.

#### 6. Sosial ekonomi masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup antara lain: keberadaan nelayan, profitabilitas usaha nelayan, pendapatan per kapita penduduk, serta potensi konflik dan hambatan sosial.

### B. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, disebutkan bahwa pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a) kriteria teknis, terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) meter;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 (seratus) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 (enam ribu) GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Ha.

b) kriteria ...

- b) kriteria operasional, terdiri dari:
  - 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
  - 2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari; dan
  - 3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
- 2. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
  - a. kriteria teknis, terdiri dari:
    - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
    - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) GT;
    - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) meter;
    - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) GT; dan
    - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Ha.
  - b. kriteria operasional, terdiri dari:
    - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 (tiga puluh) ton per hari; dan
    - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
- 3. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
  - a. kriteria teknis, terdiri dari:
    - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia;
    - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT;
    - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter;
    - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan
    - 5) memanfaatkan ...

- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.
- b. kriteria operasional, terdiri dari:
- 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
  - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
- a. kriteria teknis terdiri dari:
- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
  - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT;
  - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter;
  - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan
  - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha.
- b. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari.

#### C. Jangka Waktu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Jangka waktu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### D. Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan perikanan baik yang sifatnya pembangunan atau pengembangan, jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Rencana Induk pelabuhan perikanan adalah sebanyak 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | NAMA PELABUHAN              | PROPINSI                 | KOTA/KABUPATEN    | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|----|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                             |                          |                   | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|    |                             |                          |                   | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| I  | WPPNRI 571                  |                          |                   |                                   |           |           |           |
| 1  | PP. Jaboi                   | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 2  | PP. Pasiran                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 3  | PP. Ulee Kareung            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 4  | PP. Pusong/Ujung Blang      | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhokseumawe  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 5  | PP. Kuala Langsa            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Langsa       | PPI                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 6  | PP. Abah Krueng             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 7  | PP. Cot Jaja                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 8  | PP. Jangka Buya             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 9  | PP. Kb. Tanjung             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 10 | PP. Kuala Brabo             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 11 | PP. Kuala Gigieng           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 12 | PP. Kuala Peukan Baro       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 13 | PP. Ujong Pei               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 14 | PP. Kuala Ie Leubeu         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 15 | PP. Neuheun                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 16 | PP. Pusong Kapal            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tamiang | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 17 | PP. Desa Mesjid             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tamiang | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 18 | PP. Lambada                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 19 | PP. Meunasah Keude/Kr. Raya | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 20 | PPI Gugop                   | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 21 | PPI Lempuyang               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 22 | PP. Alue Bu Jalan Baroeh    | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 23 | PP. Alue Lhok               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 24 | PP. Baroeh Bugging          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 25 | PP. Seuneubok Baroh         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 26 | PP. Blang Uyok              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO | NAMA PELABUHAN          | PROPINSI                 | KOTA/KABUPATEN   | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|----|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                         |                          |                  | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|    |                         |                          |                  | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 27 | PP. Jaring              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 28 | PP. Kuala Idi           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur  | PPI                               | PPI       | PPP       | PPN       |
| 29 | PP. Kuala Leuge         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 30 | PP. Teupin Pukat        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 31 | PP. Kuala Keureuto      | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 32 | PP. Glumpang Umpung Uno | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 33 | PP. Krueng Mane         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 34 | PP. Kuala Cangkoy       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 35 | PP. Teupin Kuyun        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 36 | PP. Bangka Jaya         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 37 | PP. Jeunieb             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 38 | PP. Kuala Jangka        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 39 | PP. Kuala Jeumpa        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 40 | PP. Kuala Raja          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 41 | PP. Peudada             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 42 | PP. Plimbang            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 43 | PP. Samalanga           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 44 | PP. Teupin Siron        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 45 | PP. Teupin Jaloe        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun      | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 46 | PP. Mereudu             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie Jaya  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 47 | PP. Pante Raja          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie Jaya  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 48 | PP. Ulim                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie Jaya  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 49 | PP. Bagan Siapi-Api     | Riau                     | Kab. Rokan Hilir | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 50 | PP. Bantan Air          | Riau                     | Kab. Bengkalis   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 51 | PP. Bengkalis           | Riau                     | Kab. Bengkalis   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 52 | PP. Jangkang            | Riau                     | Kab. Bengkalis   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 53 | PP. Meskom              | Riau                     | Kab. Bengkalis   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |



| NO | NAMA PELABUHAN                   | PROPINSI       | KOTA/KABUPATEN       | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|----|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                  |                |                      | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|    |                                  |                |                      | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 54 | PP. Prapat Tunggal               | Riau           | Kab. Bengkalis       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 55 | PP. Titi akar                    | Riau           | Kab. Bengkalis       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 56 | PP. Dompas                       | Riau           | Kab. Bengkalis       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 57 | PP. Dermaga Perairan Teluk Dalam | Riau           | Kab. Pelalawan       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 58 | PP. Dumai                        | Riau           | Kota Dumai           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 59 | PP. Tanjung Samak                | Riau           | Kab. Kep. Meranti*   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPP       |
| 60 | PP. Selat Panjang                | Riau           | Kab. Kep. Meranti*   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 61 | PP. Concong Luar                 | Riau           | Kab. Indragiri Hilir | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 62 | PP. Kuala Enok                   | Riau           | Kab. Indragiri Hilir | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 63 | PP. Sungai Guntung               | Riau           | Kab. Indragiri Hilir | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 64 | PP. Tembilahan                   | Riau           | Kab. Indragiri Hilir | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 65 | PP. Tanjung Balai Karimun        | Kep. Riau      | Kab. Karimun         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 66 | PP. Bagan Deli                   | Sumatera Utara | Kota Medan           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 67 | PP. Belawan                      | Sumatera Utara | Kota Medan           | PPS                               | PPS       | PPS       | PPS       |
| 68 | PP. Nelayan Indah                | Sumatera Utara | Kota Metro           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 69 | PP. Bagan Percut                 | Sumatera Utara | Kab. Deliserdang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 70 | PP. Bagan Serdang                | Sumatera Utara | Kab. Deliserdang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 71 | PP. Pantai Labu                  | Sumatera Utara | Kab. Deliserdang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 72 | PP. Perupuk                      | Sumatera Utara | Kab. Batubara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 73 | PP. Desa Lalang                  | Sumatera Utara | Kab. Batubara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 74 | PP. P. Kampai                    | Sumatera Utara | Kab. Langkat         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 75 | PP. Kuala Serapu                 | Sumatera Utara | Kab. Langkat         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 76 | PP. Pangkalan Brandan            | Sumatera Utara | Kab. Langkat         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 77 | PP. Biduk Bubun                  | Sumatera Utara | Kab. Langkat         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 78 | PP. Pangkalan Susu               | Sumatera Utara | Kab. Langkat         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 79 | PP. Sei Berombang                | Sumatera Utara | Kab. Labuhanbatu     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 80 | PP. Labuhan Bilik                | Sumatera Utara | Kab. Labuhanbatu     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Tanjung ...

| NO  | NAMA PELABUHAN           | PROPINSI                 | KOTA/KABUPATEN         | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                          |                          |                        | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                          |                          |                        | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 81  | PP. Tanjung Balai Asahan | Sumatera Utara           | Kab. Asahan            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPP       |
| 82  | PP. Sialang Buah         | Sumatera Utara           | Kab. Serdang Bedagai   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 83  | PP. Tanjung Beringin     | Sumatera Utara           | Kab. Serdang Bedagai   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 84  | PP. Bagan Kuala          | Sumatera Utara           | Kab. Serdang Bedagai   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 85  | PP. Tanjung Leidong      | Sumatera Utara           | Kab. Labuhanbatu Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 86  | PP. Campae               | Sumatera Utara           | Kab. Labuhanbatu Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 87  | PP. Tanjung Tiram        | Sumatera Utara           | Kab. Batubara          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 88  | PP. Pangkalan Dodek      | Sumatera Utara           | Kab. Batubara          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| II  | WPPNRI 572               |                          |                        |                                   |           |           |           |
| 89  | PP. Alue Naga I          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 90  | PP. Alue Naga II         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 91  | PP. Deah Baro            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 92  | PP. Deah Glumpang        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 93  | PP. Lampulo              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPP                               | PPP       | PPN       | PPS       |
| 94  | PP. Titi Arusan          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 95  | PP. Ulee Lheu            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 96  | PP. Kuala Bubon          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 97  | PP. Lam Teungoh          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 98  | PP. Lhok Bubon           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 99  | PP. Suak Seumaseh        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 100 | PP. Alue Rambot          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat Daya   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 101 | PP. Blang Padang         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat Daya   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 102 | PP. Lhok Pawoh           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat Daya   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 103 | PP. Padang Panjang       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat Daya   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 104 | PP. Ujung Serangga       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat Daya   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 105 | PP. Glee Bruek           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 106 | PP. Kareung              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN            | PROPINSI                 | KOTA/KABUPATEN    | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                           |                          |                   | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                           |                          |                   | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 107 | PP. Lambaro Neujid        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 108 | PP. Lampuyang             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 109 | PP. Lamteh                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 110 | PP. Layeuen               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 111 | PP. Lhok Seudu            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 112 | PP. Mon Ikeun             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 113 | PP. Saney                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 114 | PP. Seurapong             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 115 | PP. Ujung Pancu           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 116 | PP. Lam tengoh            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 117 | PP. Alue Ambang           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 118 | PP. Babah Nipah           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 119 | PP. Calang                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 120 | PP. Krueng No             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 121 | PP. Kuala Unga            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 122 | PP. Lambeusoi/Ujung Muloh | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 123 | PP. Lhok Glumpang         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 124 | PP. Lhok Kruet            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 125 | PP. Patek                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 126 | PP. Pulo Raya             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 127 | PP. Rigaih                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 128 | PP. Ujong Baroeh          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 129 | PP. Ujung Seudeun         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 130 | PP. Air Berudang          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 131 | PP. Batu Itam             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 132 | PP. Gunung Kerambil       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 133 | PP. Kemumu Hilir          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Keude...

| NO  | NAMA PELABUHAN                 | PROPINSI                 | KOTA/KABUPATEN    | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                |                          |                   | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                                |                          |                   | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 134 | PP. Keude Bakongan             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 135 | PP. Keude Meukek               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 136 | PP. Keudeh Trumon              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 137 | PP. Kuala Iboh                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 138 | PP. Kuta Blang                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 139 | PP. Labuhan Tarok              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 140 | PP. Lhok Aman                  | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 141 | PP. Lhok Bengkuang             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 142 | PP. Lhok Reukam                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 143 | PP. Padang Bakau               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 144 | PP. Labuhan Haji (Pasar Lama ) | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 145 | PP. Pasie Kuala Ba'u           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 146 | PP. Pasie Seubadeh             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 147 | PP. Rantau Binuang             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 148 | PP. Sawang Ba'u                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 149 | PP. Ujung Rayeuk               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 150 | PP. Dermaga Anak Laut          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 151 | PP. Demaga Haloban             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 152 | PP. Dermaga Ikan Pulau Baguk   | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 153 | PP. Dermaga Ikan Pulau Balai   | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 154 | PP. Dermaga Teluk Nibung       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 155 | PP. Dermaga Ujung Sialit       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 156 | PP. Suka Makmur                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 157 | PP. Babah Lueng                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Nagan Raya   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 158 | PP. Kuala Tadu                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Nagan Raya   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 159 | PP. Kuala Tuha                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Nagan Raya   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 160 | PP. Busong                     | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Labuhan ...

| NO  | NAMA PELABUHAN            | PROPINSI                 | KOTA/KABUPATEN | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                           |                          |                | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                           |                          |                | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 161 | PP. Labuhan Bajou         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 162 | PP. Labuhan Bakti         | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 163 | PP. Latak Aya             | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 164 | PP. Latiung               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 165 | PP. Lewak                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 166 | PP. Lhok Araban           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 167 | PP. Lhok Bihau            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 168 | PP. Lhok Suka Jaya        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 169 | PP. Lugu                  | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 170 | PP. Malasin/Pasar Sibigo  | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 171 | PP. Nasreue               | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 172 | PP. Potongan              | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 173 | PP. Salur                 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 174 | PP. Sambai                | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 175 | PP. Suka Karya            | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 176 | PP. Tanjung Raya          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 177 | PP. Ujung Sarang          | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 178 | PP. Gosong Telaga Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Singkil   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 179 | PP. Gosong Telaga Utara   | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Singkil   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 180 | PP. Pulau Sarok           | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Singkil   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 181 | PP. Batuang               | Sumatera Barat           | Kota Padang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 182 | PP. Bungus                | Sumatera Barat           | Kota Padang    | PPS                               | PPS       | PPS       | PPS       |
| 183 | PP. Gaung                 | Sumatera Barat           | Kota Padang    | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 184 | PP. Muara Anai            | Sumatera Barat           | Kota Padang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 185 | PP. Muaro                 | Sumatera Barat           | Kota Padang    | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 186 | PP. Pasie Nan Tigo        | Sumatera Barat           | Kota Padang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 187 | PP. Karan Aur             | Sumatera Barat           | Kota Pariaman  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN         | PROPINSI       | KOTA/KABUPATEN       | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                        |                |                      | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                        |                |                      | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 188 | PP. Muaro Pariaman     | Sumatera Barat | Kota Pariaman        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 189 | PP. Nareh              | Sumatera Barat | Kota Pariaman        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 190 | PP. Mentawai           | Sumatera Barat | Kab. Kep. Mentawai   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 191 | PP. Tiku               | Sumatera Barat | Kab. Agam            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 192 | PP. Muaro Putus        | Sumatera Barat | Kab. Agam            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 193 | PP. Sikakap            | Sumatera Barat | Kab. Kep. Mentawai   | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 194 | PP. Tuapejat           | Sumatera Barat | Kab. Kep. Mentawai   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 195 | PP. Batang Gasan       | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 196 | PP. Pariaman           | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 197 | PP. Pasir Baru         | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 198 | PP. Ulakan Tapakis     | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 199 | PP. Air Bangis         | Sumatera Barat | Kab. Pasaman Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 200 | PP. Sasak              | Sumatera Barat | Kab. Pasaman Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 201 | PP. Api-Api            | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 202 | PP. Batu Kalang        | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 203 | PP. Carocok Tarusan    | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | PPI                               | PPI       | PPP       | PPN       |
| 204 | PP. Muara Batang Kapas | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 205 | PP. Muara Gadang       | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 206 | PP. Muara Jambu        | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 207 | PP. Pasar Kambang      | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 208 | PP. Surantih           | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 209 | PP. Sibolga (PPI)      | Sumatera Utara | Kota Sibolga         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 210 | PP. Pulau Telo         | Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 211 | PP. Sirombu            | Sumatera Utara | Kab. Nias Barat*     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 212 | PP. Botolakha          | Sumatera Utara | Kab. Nias Utara*     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 213 | PP. Lahewa             | Sumatera Utara | Kab. Nias Utara*     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 214 | PP. Labuhan Hiu        | Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Teluk ...

| NO  | NAMA PELABUHAN           | PROPINSI       | KOTA/KABUPATEN        | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                          |                |                       | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                          |                |                       | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 215 | PP. Teluk Dalam          | Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 216 | PP. Barus                | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 217 | PP. Labuhan Angin        | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 218 | PP. Pandan               | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 219 | PP. Sibolga              | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah  | PPN                               | PPN       | PPS       | PPS       |
| 220 | PP. Sitisir-tiris        | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 221 | PP. Sorkam               | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 222 | PP. Toba                 | Sumatera Utara | Kab. Simalungun       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 223 | PP. Pasar Bengkulu       | Bengkulu       | Kota Bengkulu         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 224 | PP. Pondok Besi          | Bengkulu       | Kota Bengkulu         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 225 | PP. Pulau Baai           | Bengkulu       | Kota Bengkulu         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 226 | PP. Air Napal            | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 227 | PP. Enggano              | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 228 | PP. Kahyapu Enggano      | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 229 | PP. Karang Pulau         | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 230 | PP. Muara Sungai Ketahun | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 231 | PP. Pasar Palik          | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 232 | PP. Sebelat              | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 233 | PP. Serangai             | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 234 | PP. Simpang Karang Pulau | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Utara   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 235 | PP. Pasar Bawah/Manna    | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 236 | PP. Pondok Kelapa        | Bengkulu       | Kab. Bengkulu Tengah  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 237 | PP. Air Rame             | Bengkulu       | Kab. Muko-Muko        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 238 | PP. Bandar Ratu          | Bengkulu       | Kab. Muko-Muko        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 239 | PP. Pasar Bantal         | Bengkulu       | Kab. Muko-Muko        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 240 | PP. Sungai Muara Ipuh    | Bengkulu       | Kab. Muko-Muko        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 241 | PP. Talang Rio           | Bengkulu       | Kab. Muko-Muko        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |

PP. Linau ...

| NO  | NAMA PELABUHAN      | PROPINSI | KOTA/KABUPATEN     | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                     |          |                    | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                     |          |                    | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 242 | PP. Linau           | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 243 | PP. Mentiring       | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 244 | PP. Merpas          | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 245 | PP. Muara Sambat    | Bengkulu | Kab. Kaur          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 246 | PP. Nusuk           | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 247 | PP. Pantai Hili     | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 248 | PP. Pasar Lama      | Bengkulu | Kab. Kaur          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 249 | PP. Sekunyit        | Bengkulu | Kab. Kaur          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 250 | PP. Sulau Wangi     | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 251 | PP. Tanjung Bulan   | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 252 | PP. Tanjung Harapan | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 253 | PP. Tebing Rambutan | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 254 | PP. Way Hawang      | Bengkulu | Kab. Kaur          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 255 | PP. Muara Maras     | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 256 | PP. Muara Pring     | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 257 | PP. Padang          | Bengkulu | Kab. Seluma        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 258 | PP. Pasar Ngalam    | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 259 | PP. Pasar Seluma    | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 260 | PP. Penago          | Bengkulu | Kab. Seluma        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 261 | PP. Pring Baru      | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 262 | PP. Talo            | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 263 | PP. Tedunan         | Bengkulu | Kab. Seluma        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 264 | PP. Lempasing       | Lampung  | Kota Bandarlampung | PPP                               | PPP       | PPP       | PPN       |
| 265 | PP. Pulau Pasaran   | Lampung  | Kota Bandarlampung | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 266 | PP. Ujung Bom       | Lampung  | Kota Bandarlampung | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 267 | PP. Bengkunat       | Lampung  | Kab. Lampung Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 268 | PP. Krui            | Lampung  | Kab. Lampung Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Lemong ...



| NO  | NAMA PELABUHAN            | PROPINSI | KOTA/KABUPATEN       | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                           |          |                      | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                           |          |                      | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 269 | PP. Lemong                | Lampung  | Kab. Lampung Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 270 | PP. Tanjung Setia         | Lampung  | Kab. Lampung Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 271 | PP. Kalianda              | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 272 | PP. Ketapang              | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 273 | PP. Kuala Jaya            | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 274 | PP. Kunjir                | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 275 | PP. Muara Piluk Bakauheni | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 276 | PP. Rangai                | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 277 | PP. Way Muli              | Lampung  | Kab. Lampung Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 278 | PP. Badak                 | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 279 | PP. Guring                | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 280 | PP. Karanganyer           | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 281 | PP. Kelumbayan            | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 282 | PP. Kota Agung            | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 283 | PP. Pematang Sawa         | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 284 | PP. Penyandingan          | Lampung  | Kab. Tanggamus       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 285 | PP. Putih Doh             | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 286 | PP. Tanjung Jaya          | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 287 | PP. Tegineneng            | Lampung  | Kab. Tanggamus       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 288 | PP. Cilegon               | Banten   | Kota Cilegon         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 289 | PP. Banyuasih             | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 290 | PP. Carita                | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 291 | PP. Cikeusik              | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 292 | PP. Citerep               | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 293 | PP. Labuan                | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 294 | PP. Panimbang             | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 295 | PP. Sidamukti             | Banten   | Kab. Pandeglang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN    | PROPINSI   | KOTA/KABUPATEN   | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                   |            |                  | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                   |            |                  | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 296 | PP. Sukanagara    | Banten     | Kab. Pandeglang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 297 | PP. Sumur         | Banten     | Kab. Pandeglang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 298 | PP. Tamanjaya     | Banten     | Kab. Pandeglang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 299 | PP. Anyer         | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 300 | PP. Domas         | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 301 | PP. Kepuh         | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 302 | PP. Lontar        | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 303 | PP. Pasauran      | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 304 | PP. Pulau Panjang | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 305 | PP. Pulokali      | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 306 | PP. Tengkurak     | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 307 | PP. Terate        | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 308 | PP. Wadas         | Banten     | Kab. Serang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| III | WPPNRI 573        |            |                  |                                   |           |           |           |
| 309 | PP. Bayah         | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 310 | PP. Binuangen     | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 311 | PP. Cibareno      | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 312 | PP. Panyaungan    | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 313 | PP. Pulomanuk     | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 314 | PP. Sawarna       | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 315 | PP. Situreger     | Banten     | Kab. Lebak       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 316 | PP. Sukahujan     | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 317 | PP. Tanjung Panto | Banten     | Kab. Lebak       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 318 | PP. Bagolo        | Jawa Barat | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 319 | PP. Batu Karas    | Jawa Barat | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 320 | PP. Bojong Selawe | Jawa Barat | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 321 | PP. Ciawitali     | Jawa Barat | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN     | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN   | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                    |             |                  | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                    |             |                  | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 322 | PP. Cikidang       | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 323 | PP. Legok Jawa     | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 324 | PP. Madasari       | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 325 | PP. Majingklak     | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 326 | PP. Muara Gatah    | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 327 | PP. Nusawiru       | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 328 | PP. Pangandaran    | Jawa Barat  | Kab. Pangandaran | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 329 | PP. Jayanti        | Jawa Barat  | Kab. Cianjur     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 330 | PP. Tegal Katilayu | Jawa Barat  | Kab. Cilacap     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 331 | PP. Cijeruk        | Jawa Barat  | Kab. Garut       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 332 | PP. Cilauteureun   | Jawa Barat  | Kab. Garut       | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 333 | PP. Cimari Muara   | Jawa Barat  | Kab. Garut       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 334 | PP. Ranca Buaya    | Jawa Barat  | Kab. Garut       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 335 | PP. Sancang        | Jawa Barat  | Kab. Garut       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 336 | PP. Cibangban      | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 337 | PP. Cisolok        | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 338 | PP. Ciwaru         | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 339 | PP. Loji           | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 340 | PP. Mina Jaya      | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 341 | PP. Palabuhan Ratu | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPN                               | PPN       | PPS       | PPS       |
| 342 | PP. Surade         | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 343 | PP. Ujung Genteng  | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 344 | PP. Cikembang      | Jawa Barat  | Kab. Sukabumi    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 345 | PP. Cimanuk        | Jawa Barat  | Kab. Tasikmalaya | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 346 | PP. Pamayang Sari  | Jawa Barat  | Kab. Tasikmalaya | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 347 | PP. Cilacap        | Jawa Tengah | Kab. Cilacap     | PPS                               | PPS       | PPS       | PPS       |
| 348 | PP. Jetis          | Jawa Tengah | Kab. Cilacap     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Kemiren ...

| NO  | NAMA PELABUHAN      | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN  | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                     |             |                 | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                     |             |                 | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 349 | PP. Kemiren         | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 350 | PP. Lengkong        | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 351 | PP. Padanarang      | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 352 | PP. Rawa Jarit      | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 353 | PP. Sentolo Kambang | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 354 | PP. Sentolo Kawat   | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 355 | PP. Sidakarya       | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 356 | PP. Bengawan Donan  | Jawa Tengah | Kab. Cilacap    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 357 | PP. Argopeni        | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 358 | PP. Criwik          | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 359 | PP. Karang Duwur    | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 360 | PP. Logending       | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 361 | PP. Pasir           | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 362 | PP. Rowo            | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 363 | PP. Tanggulangin    | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 364 | PP. Tegal Retno     | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 365 | PP. Tambak Mulyo    | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 366 | PP. Surejan         | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 367 | PP. Lembupurwo      | Jawa Tengah | Kab. Kebumen    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 368 | PP. Jati Kotal      | Jawa Tengah | Kab. Purworejo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 369 | PP. Jati Malang     | Jawa Tengah | Kab. Purworejo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 370 | PP. Kaburuhan       | Jawa Tengah | Kab. Purworejo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 371 | PP. Kertojoyan      | Jawa Tengah | Kab. Purworejo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 372 | PP. Blimbing Sari   | Jawa Timur  | Kab. Banyuwangi | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 373 | PP. Gradjagan       | Jawa Timur  | Kab. Banyuwangi | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 374 | PP. Mandar          | Jawa Timur  | Kab. Banyuwangi | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 375 | PP. Muncar          | Jawa Timur  | Kab. Banyuwangi | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |

PP. Pancer ...

| NO  | NAMA PELABUHAN      | PROPINSI   | KOTA/KABUPATEN  | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                     |            |                 | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                     |            |                 | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 376 | PP. Pancer          | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 377 | PP. Ketapang        | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 378 | PP. Jolosutro       | Jawa Timur | Kab. Blitar     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 379 | PP. Pantai Pangi    | Jawa Timur | Kab. Blitar     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 380 | PP. Serang          | Jawa Timur | Kab. Blitar     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 381 | PP. Tambakrejo      | Jawa Timur | Kab. Blitar     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 382 | PP. Bandealit       | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 383 | PP. Getem           | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 384 | PP. Jeni            | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 385 | PP. Paseban         | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 386 | PP. Puger           | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 387 | PP. Watu Ulo        | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 388 | PP. Watulimo        | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 389 | PP. Gumukmas        | Jawa Timur | Kab. Jember     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 390 | PP. Melman          | Jawa Timur | Kab. Lumajang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 391 | PP. Karangmenjangan | Jawa Timur | Kab. Lumajang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 392 | PP. Dampar          | Jawa Timur | Kab. Lumajang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 393 | PP. Bulurejo        | Jawa Timur | Kab. Lumajang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 394 | PP. Tegalrejo       | Jawa Timur | Kab. Lumajang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 395 | PP. Pondok Dadap    | Jawa Timur | Kab. Malang     | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 396 | PP. Pujiharjo       | Jawa Timur | Kab. Malang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 397 | PP. Sumberrejo      | Jawa Timur | Kab. Pacitan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 398 | PP. Tamperan        | Jawa Timur | Kab. Pacitan    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 399 | PP. Tawang          | Jawa Timur | Kab. Pacitan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 400 | PP. Watukarung      | Jawa Timur | Kab. Pacitan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 401 | PP. Wawaran         | Jawa Timur | Kab. Pacitan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 402 | PP. Sukarejo        | Jawa Timur | Kab. Pacitan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Kebon ...

| NO  | NAMA PELABUHAN  | PROPINSI   | KOTA/KABUPATEN    | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|-----------------|------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                 |            |                   | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                 |            |                   | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 403 | PP. Kebon Agung | Jawa Timur | Kab. Pacitan      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 404 | PP. Ngadirojo   | Jawa Timur | Kab. Pacitan      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 405 | PP. Sudimoro    | Jawa Timur | Kab. Pacitan      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 406 | PP. Blado       | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 407 | PP. Jokerto     | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 408 | PP. Konaang     | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 409 | PP. Ngadipuro   | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 410 | PP. Ngampiran   | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 411 | PP. Prigi       | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 412 | PP. Damas       | Jawa Timur | Kab. Trenggalek   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 413 | PP. Brumbun     | Jawa Timur | Kab. Tulungagung  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 414 | PP. Gerangan    | Jawa Timur | Kab. Tulungagung  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 415 | PP. Klatak      | Jawa Timur | Kab. Tulungagung  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 416 | PP. Ngelo       | Jawa Timur | Kab. Tulungagung  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 417 | PP. Popoh       | Jawa Timur | Kab. Tulungagung  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 418 | PP. Sine        | Jawa Timur | Kab. Tulungagung  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 419 | PP. Depok       | Yogyakarta | Kab. Bantul       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 420 | PP. Kuwaru      | Yogyakarta | Kab. Bantul       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 421 | PP. Pandansimo  | Yogyakarta | Kab. Bantul       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 422 | PP. Samas       | Yogyakarta | Kab. Bantul       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 423 | PP. Baron       | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 424 | PP. Drini       | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 425 | PP. Gesing      | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 426 | PP. Kukup       | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 427 | PP. Ngrenehan   | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 428 | PP. Sadeng      | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 429 | PP. Siung       | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Sundak ...

| NO  | NAMA PELABUHAN     | PROPINSI            | KOTA/KABUPATEN     | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                    |                     |                    | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                    |                     |                    | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 430 | PP. Sundak         | Yogyakarta          | Kab. Gunung Kidul  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 431 | PP. Wedi ombo      | Yogyakarta          | Kab. Gunung Kidul  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 432 | PP. Bugel          | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 433 | PP. Congot         | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 434 | PP. Glagah         | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 435 | PP. Jangkaran      | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 436 | PP. Karang Wuni    | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 437 | PP. Trisik         | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 438 | PP. Serangan       | Bali                | Kota Denpasar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 439 | PP. Kedonganan     | Bali                | Kab. Badung        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 440 | PP. Tanjung Benoa  | Bali                | Kab. Badung        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 441 | PP. Batununggul    | Bali                | Kab. Badung        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 442 | PP. Pengambangan   | Bali                | Kab. Jembrana      | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 443 | PP. Yeh Sumbul     | Bali                | Kab. Jembrana      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 444 | PP. Air Kuning     | Bali                | Kab. Jembrana      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 445 | PP. Amed           | Bali                | Kab. Karang Asem   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 446 | PP. Kusamba        | Bali                | Kab. Klungkung     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 447 | PP. Sape           | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 448 | PP. Waworada       | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 449 | PP. Waworoi        | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 450 | PP. Teluk Awang    | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | PPI                               | PPP       | PPP       | PPN       |
| 451 | PP. Batu Nampar    | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 452 | PP. Labuhan Haji   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 453 | PP. Labuhan Lombok | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur  | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 454 | PP. Tanjung Luar   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 455 | PP. Cemara         | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 456 | PP. Sekotong       | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |

PP. Kebon ...

| NO  | NAMA PELABUHAN      | PROPINSI            | KOTA/KABUPATEN            | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                     |                     |                           | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                     |                     |                           | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 457 | PP. Kebon Ayu       | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat         | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 458 | PP. Meninting       | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat         | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 459 | PP. Labuhan Buwah   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 460 | PP. Labuhan Lalar   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 461 | PP. Labuhan Mapin   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 462 | PP. Teluk Bungi     | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 463 | PP. Labuhan Tano    | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 464 | PP. Atapupu         | Nusa Tenggara Timur | Kab. Belu                 | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 465 | PP. Borong          | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Timur      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 466 | PP. Hukung Lewoleba | Nusa Tenggara Timur | Kab. Lembata              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 467 | PP. Aimere          | Nusa Tenggara Timur | Kab. Ngada                | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 468 | PP. Tulanda         | Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote Ndao            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 469 | PP. Tenau Kupang    | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang               | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 470 | PP. Oeba            | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang               | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 471 | PP. Nangamesi       | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Timur          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 472 | PP. Watuadu         | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Timur          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 473 | PP. Wini            | Nusa Tenggara Timur | Kab. Timur Tengah Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 474 | PP. Wonokaka        | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Barat          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 475 | PP. Ledehanah       | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sabu Raijua          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| IV  | WPPNRI 711          |                     |                           |                                   |           |           |           |
| 476 | PP. Kampung Laut    | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 477 | PP. Nipah Panjang   | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 478 | PP. Teluk Majelis   | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 479 | PP. Sadu            | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 480 | PP. Air Hitam Laut  | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 481 | PP. Mendahara Ilir  | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 482 | PP. Kuala Tungkal   | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |



| NO  | NAMA PELABUHAN                 | PROPINSI             | KOTA/KABUPATEN            | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                |                      |                           | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                                |                      |                           | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 483 | PP. Sungai Dualap              | Jambi                | Kab. Tanjung Jabung Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 484 | PP. Semerap                    | Jambi                | Kab. Kerinci              | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 485 | PP. Muara Sungai Baturusa      | Kep. Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 486 | PP. Kota Pangkal Pinang        | Kep. Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 487 | PP. Muntok                     | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka Barat         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 488 | PP. Sungailiat                 | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka               | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 489 | PP. Batu Belubang              | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 490 | PP. Kurau                      | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 491 | PP. Sungai Selan               | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 492 | PP. Sadai                      | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka Selatan       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 493 | PP. Toboali                    | Kep. Bangka Belitung | Kab. Bangka Selatan       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 494 | PP. Gantung                    | Kep. Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 495 | PP. Kelabat                    | Kep. Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 496 | PP. Manggar Belitung           | Kep. Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 497 | PP. Selendang Kampit           | Kep. Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 498 | PP. Selat Nasik                | Kep. Bangka Belitung | Kab. Belitung             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 499 | PP. Tanjung Pandan             | Kep. Bangka Belitung | Kab. Belitung             | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 500 | PP. Antang Tarempa             | Kep. Riau            | Kab. Kep. Anambas         | PPP                               | PPP       | PPP       | PPN       |
| 501 | PP. Jemaja                     | Kep. Riau            | Kab. Kep. Anambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 502 | PP. Kuala Maras                | Kep. Riau            | Kab. Kep. Anambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 503 | PP. Nyamuk                     | Kep. Riau            | Kab. Kep. Anambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 504 | PP. Air Sena                   | Kep. Riau            | Kab. Kep. Anambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 505 | PP. Kiabu                      | Kep. Riau            | Kab. Kep. Anambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 506 | PP. Kijang                     | Kep. Riau            | Kab. Bintan (Kep. Riau)   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 507 | PP. Batu Duyung (Bintan Timur) | Kep. Riau            | Kab. Bintan               | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 508 | PP. Moro                       | Kep. Riau            | Kab. Karimun              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 509 | PP. Parit Rempak               | Kep. Riau            | Kab. Karimun              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Barelang ...

| NO  | NAMA PELABUHAN        | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN      | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                       |                  |                     | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                       |                  |                     | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 510 | PP. Bareleng          | Kep. Riau        | Kota Batam          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 511 | PP. Telaga Punggur    | Kep. Riau        | Kota Batam          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 512 | PP. Pulau Tiga        | Kep. Riau        | Kab. Natuna         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPP       |
| 513 | PP. Ranai             | Kep. Riau        | Kab. Natuna         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 514 | PP. Sedanau           | Kep. Riau        | Kab. Natuna         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 515 | PP. Penuba            | Kep. Riau        | Kab. Lingga         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 516 | PP. Senayang          | Kep. Riau        | Kab. Lingga         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 517 | PP. Tajur Biru        | Kep. Riau        | Kab. Lingga         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 518 | PP. Tanjung Pinang    | Kep. Riau        | Kota Tanjungpinang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 519 | PP. Sinaboi           | Riau             | Kab. Rokan Hilir    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 520 | PP. Jakabaring        | Sumatera Selatan | Kota Palembang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 521 | PP. Kuala Air Sugihan | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 522 | PP. Sungai Musi       | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 523 | PP. Sungai Lumpur     | Sumatera Selatan | Kab. OKI            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 524 | PP. Sungsi Batang     | Sumatera Selatan | Kab. OKI            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 525 | PP. Sungsang          | Sumatera Selatan | Kab. Banyuasin      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 526 | PP. Karimunting       | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 527 | PP. Lemukutan         | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 528 | PP. Pulau Kabung      | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 529 | PP. Sui Pangkalan II  | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 530 | PP. Sui Raya          | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 531 | PP. Sungai Duri       | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 532 | PP. Sungai Jaga       | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 533 | PP. Teluk Suak        | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 534 | PP. Putussibau        | Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu    | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 535 | PP. Betok             | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 536 | PP. Dusun Besar       | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Dusun ...

| NO  | NAMA PELABUHAN     | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN    | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                    |                  |                   | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                    |                  |                   | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 537 | PP. Dusun Kecil    | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 538 | PP. Padang         | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 539 | PP. Pelapis        | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 540 | PP. Pulau Kumbang  | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 541 | PP. Siduk          | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 542 | PP. Sukadana       | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 543 | PP. Sungai Sambas  | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 544 | PP. Tanjung Satai  | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 545 | PP. Teluk Batang   | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPP                               | PPP       | PPP       | PPN       |
| 546 | PP. Teluk Melano   | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 547 | PP. Kendawangan    | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 548 | PP. Pesakuan       | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 549 | PP. Suka Bangun    | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 550 | PP. Batu Ampar     | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 551 | PP. Dabong         | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 552 | PP. Medan Seri     | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 553 | PP. Muara Kubu     | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 554 | PP. Rasau Jaya     | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 555 | PP. Sepok Laut     | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 556 | PP. Sungai Kakap   | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 557 | PP. Sungai Rengas  | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 558 | PP. Tanjung Bunga  | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 559 | PP. Bakau Besar    | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 560 | PP. Bakau Kecil    | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 561 | PP. Jungkat        | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 562 | PP. Kuala Mempawah | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPP       |
| 563 | PP. Nusa Pati      | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN        | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN      | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                       |                  |                     | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                       |                  |                     | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 564 | PP. Peniti            | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 565 | PP. Semudun           | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 566 | PP. Sui Purun         | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 567 | PP. Sungai Kunyit     | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 568 | PP. Sungai Pinyuh     | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 569 | PP. Arung Parak       | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 570 | PP. Liku              | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 571 | PP. Pemangkat         | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPN                               | PPN       | PPN       | PPS       |
| 572 | PP. Selakau           | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 573 | PP. Sentebang         | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 574 | PP. Tanah Hitam       | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 575 | PP. Temajuk           | Kalimantan Barat | Kab. Sambas         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 576 | PP. Sungai Jawi       | Kalimantan Barat | Kota Pontianak      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 577 | PP. Kuala             | Kalimantan Barat | Kota Singkawang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 578 | PP. Sedau             | Kalimantan Barat | Kota Singkawang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| V   | WPPNRI 712            |                  |                     |                                   |           |           |           |
| 579 | PP. Cabang            | Lampung          | Kab. Lampung Tengah | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 580 | PP. Kuala Penet       | Lampung          | Kab. Lampung Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 581 | PP. Labuhan Maringgai | Lampung          | Kab. Lampung Timur  | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 582 | PP. Teladas           | Lampung          | Kab. Tulang Bawang  | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 583 | PP. Karangantu        | Banten           | Kota Serang         | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 584 | PP. Cituis            | Banten           | Kab. Tangerang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 585 | PP. Dadap             | Banten           | Kab. Tangerang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 586 | PP. Ketapang          | Banten           | Kab. Tangerang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 587 | PP. Kronjo            | Banten           | Kab. Tangerang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 588 | PP. Mauk Barat        | Banten           | Kab. Tangerang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 589 | PP. Tanjung Pasir     | Banten           | Kab. Tangerang      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN            | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN        | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                           |             |                       | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                           |             |                       | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 590 | PP. Cilincing             | DKI Jakarta | Jakarta Utara         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 591 | PP. Kalibaru              | DKI Jakarta | Jakarta Utara         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 592 | PP. Kamal Muara           | DKI Jakarta | Jakarta Utara         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 593 | PP. Muara Angke           | DKI Jakarta | Jakarta Utara         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 594 | PP. Nizam Zachman Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara         | PPS                               | PPS       | PPS       | PPS       |
| 595 | PP. Kali Adem             | DKI Jakarta | Jakarta Utara         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 596 | PP. Pulau Pramuka         | DKI Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 597 | PP. Cangkol               | Jawa Barat  | Kota Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 598 | PP. Kasenden              | Jawa Barat  | Kota Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 599 | PP. Kejawanan             | Jawa Barat  | Kota Cirebon          | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 600 | PP. Pesisir               | Jawa Barat  | Kota Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 601 | PP. Muara Bendera         | Jawa Barat  | Kab. Bekasi           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 602 | PP. Muara Bungin          | Jawa Barat  | Kab. Bekasi           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 603 | PP. Muara Jaya            | Jawa Barat  | Kab. Bekasi           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 604 | PP. Pal Jaya              | Jawa Barat  | Kab. Bekasi           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 605 | PP. Ambulu                | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 606 | PP. Bandengan             | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 607 | PP. Bondet                | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 608 | PP. Bungko                | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 609 | PP. Bungko Lor            | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 610 | PP. Citemu                | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 611 | PP. Condong               | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 612 | PP. Ender                 | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 613 | PP. Gebang Mekar          | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 614 | PP. Grogol                | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 615 | PP. Kalipasung            | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 616 | PP. Karang Reja           | Jawa Barat  | Kab. Cirebon          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN                 | PROPINSI   | KOTA/KABUPATEN | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                |            |                | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                                |            |                | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 617 | PP. Mundu Pesisir              | Jawa Barat | Kab. Cirebon   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 618 | PP. Pengarengan                | Jawa Barat | Kab. Cirebon   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 619 | PP. Playangan                  | Jawa Barat | Kab. Cirebon   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 620 | PP. Tawang Sari                | Jawa Barat | Kab. Cirebon   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 621 | PP. Waru Duwur                 | Jawa Barat | Kab. Cirebon   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 622 | PP. Bedahan                    | Jawa Barat | Kab. Indramayu | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 623 | PP. Cangkring                  | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 624 | PP. Dadap                      | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 625 | PP. Eretan Kulon               | Jawa Barat | Kab. Indramayu | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 626 | PP. Eretan Wetan               | Jawa Barat | Kab. Indramayu | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 627 | PP. Juntinyuat                 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 628 | PP. Kali Menir                 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 629 | PP. Karangsong                 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 630 | PP. Limbangan                  | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 631 | PP. Lombang                    | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 632 | PP. Majakerta                  | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 633 | PP. Sukahaji/Bugel             | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 634 | PP. Tegal Agung                | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 635 | PP. Ujung Gebang               | Jawa Barat | Kab. Indramayu | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 636 | PP. Singaraja                  | Jawa Barat | Kab. Indramayu | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 637 | PP. Cemara                     | Jawa Barat | Kab. Karawang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 638 | PP. Ciparage                   | Jawa Barat | Kab. Karawang  | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 639 | PP. Mekar Jati / Fajar Samudra | Jawa Barat | Kab. Karawang  | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 640 | PP. Muara / Samudra Mina       | Jawa Barat | Kab. Karawang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 641 | PP. Pasir Putih                | Jawa Barat | Kab. Karawang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 642 | PP. Satar                      | Jawa Barat | Kab. Karawang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 643 | PP. Sedari                     | Jawa Barat | Kab. Karawang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Sungai ...

| NO  | NAMA PELABUHAN               | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN  | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                              |             |                 | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                              |             |                 | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 644 | PP. Sungai Buntu             | Jawa Barat  | Kab. Karawang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 645 | PP. Tambaksari               | Jawa Barat  | Kab. Karawang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 646 | PP. Tangkolak                | Jawa Barat  | Kab. Karawang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 647 | PP. Tanjungpakis / Pakisjaya | Jawa Barat  | Kab. Karawang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 648 | PP. Blanakan                 | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 649 | PP. Cilamaya Girang          | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 650 | PP. Cirewang                 | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 651 | PP. Genteng                  | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 652 | PP. Mayangan (Subang)        | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 653 | PP. Muara Ciasem             | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 654 | PP. Patimban                 | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 655 | PP. Rawameneng               | Jawa Barat  | Kab. Subang     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 656 | PP. Banyawakan               | Jawa Barat  | Kab. Tangerang  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 657 | PP. Kota Tegal               | Jawa Tengah | Kota Tegal      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 658 | PP. Muara Reja               | Jawa Tengah | Kota Tegal      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 659 | PP. Tegalsari                | Jawa Tengah | Kota Tegal      | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 660 | PP. Boom Lama                | Jawa Tengah | Kota Semarang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 661 | PP. Mangun Harjo             | Jawa Tengah | Kota Semarang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 662 | PP. Tambak Lorok             | Jawa Tengah | Kota Semarang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 663 | PP. Pekalongan               | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 664 | PP. Crucuk                   | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 665 | PP. Kali Gangsa              | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 666 | PP. Kaliwlingi               | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 667 | PP. Kluwut                   | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 668 | PP. Krakahan                 | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 669 | PP. Pangaradan               | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 670 | PP. Prapag Kidul             | Jawa Tengah | Kab. Brebes     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN   | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                  |             |                | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                  |             |                | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 671 | PP. Pulolampes   | Jawa Tengah | Kab. Brebes    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 672 | PP. Sawojajar    | Jawa Tengah | Kab. Brebes    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 673 | PP. Celong       | Jawa Tengah | Kab. Batang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 674 | PP. Klidang Lor  | Jawa Tengah | Kab. Batang    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 675 | PP. Roban        | Jawa Tengah | Kab. Batang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 676 | PP. Seklayu      | Jawa Tengah | Kab. Batang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 677 | PP. Bandungharjo | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 678 | PP. Bondo        | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 679 | PP. Bulu         | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 680 | PP. Demaan       | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 681 | PP. Jobokuto     | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 682 | PP. Karimun Jawa | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 683 | PP. Kedungmalang | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 684 | PP. Mlonggo      | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 685 | PP. Panggung     | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 686 | PP. Tubanan      | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 687 | PP. Ujung Watu   | Jawa Tengah | Kab. Jepara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 688 | PP. Babalan      | Jawa Tengah | Kab. Demak     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 689 | PP. Betahwalang  | Jawa Tengah | Kab. Demak     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 690 | PP. Bungo        | Jawa Tengah | Kab. Demak     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 691 | PP. Morodemak    | Jawa Tengah | Kab. Demak     | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 692 | PP. Wedung       | Jawa Tengah | Kab. Demak     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 693 | PP. Alas Dowo    | Jawa Tengah | Kab. Pati      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 694 | PP. Bajomulyo    | Jawa Tengah | Kab. Pati      | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 695 | PP. Banyutowo    | Jawa Tengah | Kab. Pati      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 696 | PP. Margomulyo   | Jawa Tengah | Kab. Pati      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 697 | PP. Pecangan     | Jawa Tengah | Kab. Pati      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Puncel ...



| NO  | NAMA PELABUHAN       | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN  | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                      |             |                 | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                      |             |                 | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 698 | PP. Puncel           | Jawa Tengah | Kab. Pati       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 699 | PP. Sambiroto        | Jawa Tengah | Kab. Pati       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 700 | PP. Bandengan        | Jawa Tengah | Kab. Kendal     | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 701 | PP. Sendang Sikucing | Jawa Tengah | Kab. Kendal     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 702 | PP. Tanggul Malang   | Jawa Tengah | Kab. Kendal     | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 703 | PP. Tawang           | Jawa Tengah | Kab. Kendal     | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 704 | PP. Jambean          | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 705 | PP. Wonokerto        | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 706 | PP. Asem Doyong      | Jawa Tengah | Kab. Pemalang   | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 707 | PP. Ketapang         | Jawa Tengah | Kab. Pemalang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 708 | PP. Mojo             | Jawa Tengah | Kab. Pemalang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 709 | PP. Tanjungsari      | Jawa Tengah | Kab. Pemalang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 710 | PP. Tasik Rejo       | Jawa Tengah | Kab. Pemalang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 711 | PP. Ulujami          | Jawa Tengah | Kab. Pemalang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 712 | PP. Larangan         | Jawa Tengah | Kab. Tegal      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 713 | PP. Surodadi         | Jawa Tengah | Kab. Tegal      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 714 | PP. Bakung           | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 715 | PP. Binangun         | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 716 | PP. Karanganyar      | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 717 | PP. Karanglincak     | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 718 | PP. Pandangan        | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 719 | PP. Pangkalan        | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 720 | PP. Pasar Banggi     | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 721 | PP. Sarang           | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 722 | PP. Tanjung Sari     | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 723 | PP. Tasik Agung      | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 724 | PP. Tunggulsari      | Jawa Tengah | Kab. Rembang    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Banyusangkah ...

| NO  | NAMA PELABUHAN      | PROPINSI   | KOTA/KABUPATEN   | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------|------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                     |            |                  | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                     |            |                  | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 725 | PP. Banyusangkah    | Jawa Timur | Kab. Bangkalan   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 726 | PP. Ketapang        | Jawa Timur | Kota Probolinggo | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 727 | PP. Mayangan        | Jawa Timur | Kota Probolinggo | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 728 | PP. Romokalisari    | Jawa Timur | Kota Surabaya    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 729 | PP. Bawean          | Jawa Timur | Kab. Gresik      | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 730 | PP. Campurejo       | Jawa Timur | Kab. Gresik      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 731 | PP. Paceng          | Jawa Timur | Kab. Gresik      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 732 | PP. Ujung Pangkah   | Jawa Timur | Kab. Gresik      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 733 | PP. Bandaran        | Jawa Timur | Kab. Pamekasan   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 734 | PP. Branta Pasisir  | Jawa Timur | Kab. Pamekasan   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 735 | PP. Pasean          | Jawa Timur | Kab. Pamekasan   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 736 | PP. Brondong        | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | PPN                               | PPN       | PPS       | PPS       |
| 737 | PP. Kranji          | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 738 | PP. Labuhan Barat   | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 739 | PP. Labuhan Timur   | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 740 | PP. Lohgung         | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 741 | PP. Paciran         | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 742 | PP. Weru Komplek    | Jawa Timur | Kab. Lamongan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 743 | PP. Bayeman         | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 744 | PP. Paiton          | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 745 | PP. Randu Putih     | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 746 | PP. Kalirejo        | Jawa Timur | Kab. Pasuruan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 747 | PP. Lekok           | Jawa Timur | Kab. Pasuruan    | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 748 | PP. Ngemplakrejo    | Jawa Timur | Kab. Pasuruan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 749 | PP. Nguling         | Jawa Timur | Kab. Pasuruan    | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 750 | PP. Balong Dowo     | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 751 | PP. Banjar Kemuning | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Bluru ...

| NO  | NAMA PELABUHAN             | PROPINSI   | KOTA/KABUPATEN | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                            |            |                | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                            |            |                | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 752 | PP. Bluru                  | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 753 | PP. Gisik Cemandi          | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 754 | PP. Juanda                 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 755 | PP. Kalanganyar            | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 756 | PP. Tambakoso              | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 757 | PP. Camplong               | Jawa Timur | Kab. Sampang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 758 | PP. Ketapang               | Jawa Timur | Kab. Sampang   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 759 | PP. Barigaan               | Jawa Timur | Kab. Situbondo | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 760 | PP. Besuki                 | Jawa Timur | Kab. Situbondo | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 761 | PP. Bungatan               | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 762 | PP. Gelung                 | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 763 | PP. Jangkar                | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 764 | PP. Kalbut                 | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 765 | PP. Ketah                  | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 766 | PP. Landangan              | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 767 | PP. Manggar Baru Situbondo | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 768 | PP. Panarukan              | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 769 | PP. Pandean                | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 770 | PP. Pondok Mimbo           | Jawa Timur | Kab. Situbondo | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 771 | PP. Somangkaan             | Jawa Timur | Kab. Situbondo | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 772 | PP. Ambunten               | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 773 | PP. Arjasa                 | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 774 | PP. Batang-batang          | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 775 | PP. Bluto                  | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 776 | PP. Dungkek                | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 777 | PP. Gapura                 | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 778 | PP. Gayam                  | Jawa Timur | Kab. Sumenep   | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Masalembu ...

| NO  | NAMA PELABUHAN           | PROPINSI          | KOTA/KABUPATEN          | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                          |                   |                         | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                          |                   |                         | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 779 | PP. Masalembu            | Jawa Timur        | Kab. Sumenep            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 780 | PP. Pasongsongan         | Jawa Timur        | Kab. Sumenep            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 781 | PP. Pragaan              | Jawa Timur        | Kab. Sumenep            | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 782 | PP. Raas                 | Jawa Timur        | Kab. Sumenep            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 783 | PP. Sapeken              | Jawa Timur        | Kab. Sumenep            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 784 | PP. Bulu                 | Jawa Timur        | Kab. Tuban              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 785 | PP. Glondonggede         | Jawa Timur        | Kab. Tuban              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 786 | PP. Kaliuntu / Kalibuntu | Jawa Timur        | Kab. Tuban              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 787 | PP. Karang Agung         | Jawa Timur        | Kab. Tuban              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 788 | PP. Karang Sari          | Jawa Timur        | Kab. Tuban              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 789 | PP. Palang               | Jawa Timur        | Kab. Tuban              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 790 | PP. Batanjung            | Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 791 | PP. Kuala Kapuas         | Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 792 | PP. Bontok               | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 793 | PP. Hantipan             | Kalimantan Tengah | Kab. Katingan           | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 794 | PP. Kasongan             | Kalimantan Tengah | Kab. Katingan           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 795 | PP. Selat Jeruju         | Kalimantan Tengah | Kab. Katingan           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 796 | PP. Bahaur               | Kalimantan Tengah | Kab. Pulang Pisau       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 797 | PP. Kumai                | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 798 | PP. Ujung Pandaran       | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 799 | PP. Kuala Jelai          | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 800 | PP. Pantai Lunci         | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 801 | PP. Sembuluh             | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan            | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 802 | PP. Kuala Pembuang       | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| VI  | WPPNRI 713               |                   |                         |                                   |           |           |           |
| 803 | PP. Tejakula             | Bali              | Kab. Buleleng           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 804 | PP. Sangsit              | Bali              | Kab. Buleleng           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN             | PROPINSI            | KOTA/KABUPATEN       | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                            |                     |                      | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                            |                     |                      | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 805 | PP. Bonto Kape             | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 806 | PP. Tanjung Bima           | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 807 | PP. Tanjung Teluk Bima     | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 808 | PP. Labuhan Aji Pulau Mojo | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 809 | PP. Labuhan Ijuk           | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 810 | PP. Labuhan Jambu          | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 811 | PP. Labuhan Jontal         | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 812 | PP. Labuhan Sangoro        | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 813 | PP. Labuhan Terata         | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 814 | PP. Labuhan Tj. Pengamas   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 815 | PP. Teluk Santong          | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 816 | PP. Labuhan Sumbawa        | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 817 | PP. Ende                   | Nusa Tenggara Timur | Kab. Ende            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 818 | PP. Paupanda               | Nusa Tenggara Timur | Kab. Ende            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 819 | PP. Kenarilang             | Nusa Tenggara Timur | Kab. Alor            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 820 | PP. Amagarapati            | Nusa Tenggara Timur | Kab. Flores Timur    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 821 | PP. Amakole Jaya           | Nusa Tenggara Timur | Kab. Flores Timur    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 822 | PP. Retaebang              | Nusa Tenggara Timur | Kab. Flores Timur    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 823 | PP. Soro Kempo             | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 824 | PP. Soroadu                | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 825 | PP. Kore                   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 826 | PP. Napa                   | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 827 | PP. Nanga Nae              | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 828 | PP. Alok                   | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sikka           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 829 | PP. Labuhan Bajo           | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 830 | PP. Nangadhero             | Nusa Tenggara Timur | Kab. Nagekeo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 831 | PP. Konge                  | Nusa Tenggara Timur | Kab. Nagekeo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Nangamese ...

| NO  | NAMA PELABUHAN            | PROPINSI            | KOTA/KABUPATEN           | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                           |                     |                          | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                           |                     |                          | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 832 | PP. Nangamese             | Nusa Tenggara Timur | Kab. Ngada               | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 833 | PP. Reo                   | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 834 | PP. Aluh-Aluh             | Kalimantan Selatan  | Kab. Banjar              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 835 | PP. Banjarmasin           | Kalimantan Selatan  | Kota Banjarmasin         | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 836 | PP. Batulicin             | Kalimantan Selatan  | Kab. Tanah Bumbu         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 837 | PP. Jorong/swarangan      | Kalimantan Selatan  | Kab. Tanah Laut          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 838 | PP. Muara Kintap          | Kalimantan Selatan  | Kab. Tanah Laut          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPP       |
| 839 | PP. Kotabaru              | Kalimantan Selatan  | Kab. Kotabaru            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 840 | PP. Sei Telan             | Kalimantan Selatan  | Kab. Barito Kuala        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 841 | PP. Filial Klandasan      | Kalimantan Timur    | Kota Balikpapan          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 842 | PP. Kampung Baru Tengah   | Kalimantan Timur    | Kota Balikpapan          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 843 | PP. Manggar Baru          | Kalimantan Timur    | Kota Balikpapan          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 844 | PP. Selili                | Kalimantan Timur    | Kota Samarinda           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 845 | PP. Tanjung Limau Bontang | Kalimantan Timur    | Kota Bontang             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 846 | PP. Babulu Laut           | Kalimantan Timur    | Kab. Penajam Paser Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 847 | PP. Api-Api               | Kalimantan Timur    | Kab. Penajam Paser Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 848 | PP. Kota Bangun           | Kalimantan Timur    | Kab. Kutai Kertanegara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 849 | PP. Sangatta              | Kalimantan Timur    | Kab. Kutai Timur         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 850 | PP. Semangkok             | Kalimantan Timur    | Kab. Kutai Kertanegara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 851 | PP. Senaken               | Kalimantan Timur    | Kab. Pasir               | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 852 | PP. Banggae               | Sulawesi Barat      | Kab. Majene              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 853 | PP. Palipi                | Sulawesi Barat      | Kab. Majene              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 854 | PP. Salutambung           | Sulawesi Barat      | Kab. Majene              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 855 | PP. Babana                | Sulawesi Barat      | Kab. Mamuju              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 856 | PP. Kasambang             | Sulawesi Barat      | Kab. Mamuju              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 857 | PP. Kasiwah               | Sulawesi Barat      | Kab. Mamuju              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 858 | PP. Karama                | Sulawesi Barat      | Kab. Mamuju Utara        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |

PP. Pantai ...

| NO  | NAMA PELABUHAN             | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN       | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                            |                  |                      | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                            |                  |                      | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 859 | PP. Pantai Batu            | Sulawesi Barat   | Kab. Mamuju Utara    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 860 | PP. Lantora                | Sulawesi Barat   | Kab. Polewali Mandar | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 861 | PP. Takatidung             | Sulawesi Barat   | Kab. Polewali Mandar | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 862 | PP. Tinambung              | Sulawesi Barat   | Kab. Polewali Mandar | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 863 | PP. Borombong              | Sulawesi Selatan | Kota Makasar         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 864 | PP. Paotere                | Sulawesi Selatan | Kota Makasar         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPP       |
| 865 | PP. Rajawali               | Sulawesi Selatan | Kota Makasar         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 866 | PP. Untia                  | Sulawesi Selatan | Kota Makasar         | PPI                               | PPP       | PPN       | PPS       |
| 867 | PP. Cempae                 | Sulawesi Selatan | Kota Pare-Pare       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 868 | PP. Lakessi                | Sulawesi Selatan | Kota Pare-Pare       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 869 | PP. Pontap                 | Sulawesi Selatan | Kota Palopo          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 870 | PP. Bantaeng               | Sulawesi Selatan | Kab. Bantaeng        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 871 | PP. Birea                  | Sulawesi Selatan | Kab. Bantaeng        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 872 | PP. Tanga - Tanga/Seruni   | Sulawesi Selatan | Kab. Bantaeng        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 873 | PP. Barru                  | Sulawesi Selatan | Kab. Barru           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 874 | PP. Kupa                   | Sulawesi Selatan | Kab. Barru           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 875 | PP. Polejiwa               | Sulawesi Selatan | Kab. Barru           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 876 | PP. Siddo                  | Sulawesi Selatan | Kab. Barru           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 877 | PP. Sumpang Binangae       | Sulawesi Selatan | Kab. Barru           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 878 | PP. Kajuara                | Sulawesi Selatan | Kab. Bone            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 879 | PP. Lonrae                 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 880 | PP. Bajange                | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 881 | PP. Bentenge               | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 882 | PP. Bintaroe               | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 883 | PP. Bonto Bahari Bulukumba | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba       | PPI                               | PPI       | PPP       | PPN       |
| 884 | PP. Herlang                | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 885 | PP. Kajang                 | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Laikang ...

| NO  | NAMA PELABUHAN         | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN         | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                        |                  |                        | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                        |                  |                        | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 886 | PP. Laikang            | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba         | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 887 | PP. Para-Para          | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba         | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 888 | PP. Danau Mawang       | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa              | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 889 | PP. Jeneponto          | Sulawesi Selatan | Kab. Jeneponto         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 890 | PP. Pabbiringan        | Sulawesi Selatan | Kab. Jeneponto         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 891 | PP. Tanrusampe         | Sulawesi Selatan | Kab. Jeneponto         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 892 | PP. Balambang          | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 893 | PP. Bonepute           | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 894 | PP. Ulo-Ulo            | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 895 | PP. Bone - Bone        | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Utara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 896 | PP. Malangke           | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Utara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 897 | PP. Malili             | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Timur        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 898 | PP. Bawasalo           | Sulawesi Selatan | Kab. Pangkep           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 899 | PP. Kalibone           | Sulawesi Selatan | Kab. Pangkep           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 900 | PP. Maccinibaji        | Sulawesi Selatan | Kab. Pangkep           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 901 | PP. Bonto Bahari Maros | Sulawesi Selatan | Kab. Maros             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 902 | PP. Labuang            | Sulawesi Selatan | Kab. Maros             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 903 | PP. Benteng/Bonehalang | Sulawesi Selatan | Kab. Selayar           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 904 | PP. Kayuadi            | Sulawesi Selatan | Kab. Selayar           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 905 | PP. Pajalele           | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 906 | PP. Ujung Lero         | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 907 | PP. Lappa              | Sulawesi Selatan | Kab. Sinjai            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 908 | PP. Tongke-Tongke      | Sulawesi Selatan | Kab. Sinjai            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 909 | PP. Mojong             | Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 910 | PP. Teteaji            | Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 911 | PP. Wette'e            | Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 912 | PP. Beba               | Sulawesi Selatan | Kab. Takalar           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |



| NO  | NAMA PELABUHAN      | PROPINSI          | KOTA/KABUPATEN    | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                     |                   |                   | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                     |                   |                   | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 913 | PP. Boddia          | Sulawesi Selatan  | Kab. Takalar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 914 | PP. Jene            | Sulawesi Selatan  | Kab. Takalar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 915 | PP. Lamangkia       | Sulawesi Selatan  | Kab. Takalar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 916 | PP. Sampulungan     | Sulawesi Selatan  | Kab. Takalar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 917 | PP. Sawangkung      | Sulawesi Selatan  | Kab. Takalar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 918 | PP. Soreang         | Sulawesi Selatan  | Kab. Takalar      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 919 | PP. Botto           | Sulawesi Selatan  | Kab. Wajo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 920 | PP. Cendanae        | Sulawesi Selatan  | Kab. Wajo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 921 | PP. Siwa            | Sulawesi Selatan  | Kab. Wajo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 922 | PP. Taipa           | Sulawesi Tengah   | Kota Palu         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 923 | PP. Batusuya        | Sulawesi Tengah   | Kab. Donggala     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 924 | PP. Donggala        | Sulawesi Tengah   | Kab. Donggala     | PPI                               | PPI       | PPP       | PPN       |
| 925 | PP. Labean          | Sulawesi Tengah   | Kab. Donggala     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 926 | PP. Ogoamas         | Sulawesi Tengah   | Kab. Donggala     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 927 | PP. Panggalasiang   | Sulawesi Tengah   | Kab. Donggala     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 928 | PP. Rumbia          | Sulawesi Tenggara | Kab. Bombana      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 929 | PP. Boepinang       | Sulawesi Tenggara | Kab. Bombana      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 930 | PP. Anaiwoi         | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 931 | PP. Dawi-Dawi       | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 932 | PP. Kolaka Asi      | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 933 | PP. Mangolo         | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 934 | PP. Sapoi           | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 935 | PP. Sipakainge      | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 936 | PP. Pitulua/Lasusua | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka Utara | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| VII | WPPNRI 714          |                   |                   |                                   |           |           |           |
| 937 | PP. Kendari         | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari      | PPS                               | PPS       | PPS       | PPS       |
| 938 | PP. Sodohoa         | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO  | NAMA PELABUHAN   | PROPINSI          | KOTA/KABUPATEN         | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|-----|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                  |                   |                        | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|     |                  |                   |                        | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 939 | PP. Wameo        | Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 940 | PP. Baturube     | Sulawesi Tengah   | Kab. Morowali          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 941 | PP. Bente        | Sulawesi Tengah   | Kab. Morowali          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 942 | PP. Sambalagi    | Sulawesi Tengah   | Kab. Morowali          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 943 | PP. Ulunambo     | Sulawesi Tengah   | Kab. Morowali          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 944 | PP. Kolodane     | Sulawesi Tengah   | Kab. Morowali          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 945 | PP. Mato         | Sulawesi Tengah   | Kab. Banggai Kepulauan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 946 | PP. Montop       | Sulawesi Tengah   | Kab. Banggai Kepulauan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 947 | PP. Kabena Barat | Sulawesi Tenggara | Kab. Bombana           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 948 | PP. Poleang      | Sulawesi Tenggara | Kab. Bombana           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 949 | PP. Pasarwajo    | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 950 | PP. Sampolawa    | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 951 | PP. Kamaru       | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 952 | PP. Buranga      | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton Utara       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 953 | PP. Minaminanga  | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton Utara       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 954 | PP. Langara      | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 955 | PP. Soropia      | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 956 | PP. Wawoni       | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 957 | PP. Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Utara      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 958 | PP. Lasolo       | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Utara      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 959 | PP. Molawe       | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Utara      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 960 | PP. Tinanggea    | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Selatan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 961 | PP. Torobulu     | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Selatan    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 962 | PP. Ereka        | Sulawesi Tenggara | Kab. Muna              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 963 | PP. Laino        | Sulawesi Tenggara | Kab. Muna              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 964 | PP. Tonbasi      | Sulawesi Tenggara | Kab. Muna              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 965 | PP. Wanci        | Sulawesi Tenggara | Kab. Wakatobi          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Ambon ...

| NO   | NAMA PELABUHAN             | PROPINSI        | KOTA/KABUPATEN             | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                            |                 |                            | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                            |                 |                            | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 966  | PP. Ambon                  | Maluku          | Kota Ambon                 | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 967  | PP. Eri                    | Maluku          | Kota Ambon                 | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 968  | PP. Kelvik Taar            | Maluku          | Kota Tual                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 969  | PP. Tual                   | Maluku          | Kota Tual                  | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 970  | PP. Masarete               | Maluku          | Kab. Buru                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 971  | PP. Benjina                | Maluku          | Kab. Kepulauan Aru         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 972  | PP. Panambulai (Jambu Air) | Maluku          | Kab. Kepulauan Aru         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 973  | PP. Warabal                | Maluku          | Kab. Kepulauan Aru         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 974  | PP. Amahai                 | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 975  | PP. Banda                  | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 976  | PP. Haria                  | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 977  | PP. Leihitu                | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 978  | PP. Masohi                 | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 979  | PP. Salahutu               | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 980  | PP. Tehoru                 | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 981  | PP. Tulehu                 | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 982  | PP. Opin                   | Maluku          | Kab. Maluku Tengah         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 983  | PP. Wetar                  | Maluku          | Kab. Maluku Barat Daya     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 984  | PP. Lairngangas            | Maluku          | Kab. Maluku Tenggara       | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 985  | PP. Penambungan            | Maluku          | Kab. Maluku Tenggara       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 986  | PP. Ukularang              | Maluku          | Kab. Maluku Tenggara Barat | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 987  | PP. Tamher Timur           | Maluku          | Kab. Seram Bagian Timur    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| VIII | WPPNRI 715                 |                 |                            |                                   |           |           |           |
| 988  | PP. Piru                   | Maluku          | Kab. Seram Bagian Barat    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 989  | PP. Ampana                 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 990  | PP. Bahari                 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 991  | PP. Malenge                | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Balantak ...

| NO   | NAMA PELABUHAN  | PROPINSI        | KOTA/KABUPATEN                | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                 |                 |                               | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                 |                 |                               | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 992  | PP. Balantak    | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 993  | PP. Bonebobakal | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 994  | PP. Bualemo     | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 995  | PP. Bunta       | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 996  | PP. Kolonedale  | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 997  | PP. Luwuk       | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 998  | PP. Pagimana    | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 999  | PP. Rata        | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1000 | PP. Toili       | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1001 | PP. Gebang Rejo | Sulawesi Tengah | Kab. Poso                     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1002 | PP. Poso        | Sulawesi Tengah | Kab. Poso                     | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1003 | PP. Boyantongo  | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Mountong          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1004 | PP. Ogotion     | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Mountong          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1005 | PP. Ongka       | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Mountong          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1006 | PP. Paranggi    | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Mountong          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1007 | PP. Petapa      | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Mountong          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1008 | PP. Sigenti     | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Mountong          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1009 | PP. Belang      | Sulawesi Utara  | Kab. Minahasa Tenggara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1010 | PP. Bentenan    | Sulawesi Utara  | Kab. Minahasa Tenggara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1011 | PP. Ratatotok   | Sulawesi Utara  | Kab. Minahasa Tenggara        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1012 | PP. Molibagu    | Sulawesi Utara  | Kab. Bolaangmongondow Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1013 | PP. Loyouw      | Sulawesi Utara  | Kab. Bolaangmongondow Timur   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1014 | PP. Kotabunan   | Sulawesi Utara  | Kab. Bolaangmongondow Timur   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1015 | PP. Jiko        | Sulawesi Utara  | Kab. Bolaangmongondow Timur   | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1016 | PP. Bilato      | Gorontalo       | Kab. Gorontalo                | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1017 | PP. Tenda       | Gorontalo       | Kota Gorontalo                | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1018 | PP. Dulupi      | Gorontalo       | Kab. Boalemo                  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Tabulo ...

| NO   | NAMA PELABUHAN       | PROPINSI     | KOTA/KABUPATEN         | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                      |              |                        | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                      |              |                        | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1019 | PP. Tabulo           | Gorontalo    | Kab. Boalemo           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1020 | PP. Tapadaa          | Gorontalo    | Kab. Boalemo           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1021 | PP. Tilamuta         | Gorontalo    | Kab. Boalemo           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1022 | PP. Tutulo           | Gorontalo    | Kab. Boalemo           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1023 | PP. Inengo           | Gorontalo    | Kab. Bone Bolango      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1024 | PP. Tongo            | Gorontalo    | Kab. Bone Bolango      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1025 | PP. Bongo            | Gorontalo    | Kab. Gorontalo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1026 | PP. Ilomata          | Gorontalo    | Kab. Gorontalo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1027 | PP. Luluo            | Gorontalo    | Kab. Gorontalo         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1028 | PP. Lemito           | Gorontalo    | Kab. Pohuwato          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1029 | PP. Marisa           | Gorontalo    | Kab. Pohuwato          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1030 | PP. Paguat           | Gorontalo    | Kab. Pohuwato          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1031 | PP. Torosiaje        | Gorontalo    | Kab. Pohuwato          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1032 | PP. Wanggarasi       | Gorontalo    | Kab. Pohuwato          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1033 | PP. Wonggarasi Timur | Gorontalo    | Kab. Pohuwato          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1034 | PP. Dufa-Dufa        | Maluku Utara | Kota Ternate           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1035 | PP. Gamalama         | Maluku Utara | Kota Ternate           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1036 | PP. Ternate          | Maluku Utara | Kota Ternate           | PPN                               | PPN       | PPN       | PPS       |
| 1037 | PP. Batang Dua       | Maluku Utara | Kota Ternate           | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1038 | PP. Goto             | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1039 | PP. Sofifi           | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1040 | PP. Bacan            | Maluku Utara | Kab. Halmahera Selatan | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 1041 | PP. Saketa           | Maluku Utara | Kab. Halmahera Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1042 | PP. Sayoang          | Maluku Utara | Kab. Halmahera Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1043 | Pulau Obi            | Maluku Utara | Kab. Halmahera Selatan | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1044 | PP. Kedi             | Maluku Utara | Kab. Halmahera Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1045 | PP. Ruba-Ruba        | Maluku Utara | Kab. Halmahera Barat   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Tuada ...

| NO   | NAMA PELABUHAN    | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN        | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                   |                  |                       | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                   |                  |                       | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1046 | PP. Tuada         | Maluku Utara     | Kab. Halmahera Barat  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1047 | PP. Loloda        | Maluku Utara     | Kab. Halmahera Barat  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1048 | PP. Manitinting   | Maluku Utara     | Kab. Halmahera Timur  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1049 | PP. Pulau Gebe    | Maluku Utara     | Kab. Halmahera Tengah | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1050 | PP. Weda          | Maluku Utara     | Kab. Halmahera Tengah | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1051 | PP. Tobelo        | Maluku Utara     | Kab. Halmahera Utara  | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 1052 | PP. Bobong        | Maluku Utara     | Kab. Kep. Sula        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1053 | PP. Wainin        | Maluku Utara     | Kab. Kep. Sula        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1054 | PP. Dofa          | Maluku Utara     | Kab. Kep. Sula        | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1055 | PP. Daruba        | Maluku Utara     | Kab. Morotai          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1056 | PP. Tiley         | Maluku Utara     | Kab. Morotai          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1057 | PP. Bere-bere     | Maluku Utara     | Kab. Morotai          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1058 | PP. Bintuni       | Papua Barat      | Kab. Teluk Bintuni    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1059 | PP. Wimro         | Papua Barat      | Kab. Teluk Bintuni    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1060 | PP. Coa Kaimana   | Papua Barat      | Kab. Kaimana          | -                                 | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1061 | PP. Himatota      | Papua Barat      | Kab. Kaimana          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1062 | PP. Avona         | Papua Barat      | Kab. Kaimana          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1063 | PP. Dulan Pok-pok | Papua Barat      | Kab. Fak-Fak          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1064 | PP. Katapop       | Papua Barat      | Kab. Sorong           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1065 | PP. Klademak      | Papua Barat      | Kota Sorong           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1066 | PP. Sorong        | Papua Barat      | Kota Sorong           | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 1067 | PP. Wersar        | Papua Barat      | Kab. Sorong Selatan   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1068 | PP. Saonek        | Papua Barat      | Kab. Raja Ampat       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| IX   | WPPNRI 716        |                  |                       |                                   |           |           |           |
| 1069 | PP. Bunyu         | Kalimantan Utara | Kab. Bulungan         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1070 | PP. Sambaliung    | Kalimantan Timur | Kab. Berau            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1071 | PP. Nunukan       | Kalimantan Utara | Kab. Nunukan          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

| NO   | NAMA PELABUHAN            | PROPINSI         | KOTA/KABUPATEN              | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                           |                  |                             | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                           |                  |                             | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1072 | PP. Sebatik               | Kalimantan Utara | Kab. Nunukan                | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1073 | PP. Tengkeyu II           | Kalimantan Utara | Kota Tarakan                | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 1074 | PP. Diapatih              | Sulawesi Tengah  | Kab. Buol                   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1075 | PP. Kuala Besar           | Sulawesi Tengah  | Kab. Buol                   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1076 | PP. Kumaligon             | Sulawesi Tengah  | Kab. Buol                   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1077 | PP. Labuton               | Sulawesi Tengah  | Kab. Buol                   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1078 | PP. Ogotua                | Sulawesi Tengah  | Kab. Toli-Toli              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1079 | PP. Tandoleo              | Sulawesi Tengah  | Kab. Toli-Toli              | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1080 | PP. Bitung                | Sulawesi Utara   | Kota Bitung                 | PPS                               | PPS       | PPS       | PPS       |
| 1081 | PP. Calaca                | Sulawesi Utara   | Kota Manado                 | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1082 | PP. Tumumpa               | Sulawesi Utara   | Kota Manado                 | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 1083 | PP. Baroko Tanjung Sidupa | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1084 | PP. Bolangitang           | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1085 | PP. Boroko                | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow Utara | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1086 | PP. Bolang Uki            | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1087 | PP. Dodepo                | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1088 | PP. Inobonto              | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1089 | PP. Labuan Uki            | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1090 | PP. Popudu                | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1091 | PP. Sidupa                | Sulawesi Utara   | Kab. Bolaangmongondow Timur | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1092 | PP. Atep Oki              | Sulawesi Utara   | Kab. Minahasa               | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1093 | PP. Tanah Wangko          | Sulawesi Utara   | Kab. Minahasa               | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1094 | PP. Beo                   | Sulawesi Utara   | Kab. Kep. Talaud            | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1095 | PP. Esang                 | Sulawesi Utara   | Kab. Kep. Talaud            | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1096 | PP. Kabaruan              | Sulawesi Utara   | Kab. Kep. Talaud            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1097 | PP. Lirung                | Sulawesi Utara   | Kab. Kep. Talaud            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1098 | PP. Melonguane            | Sulawesi Utara   | Kab. Kep. Talaud            | -                                 | -         | PPI       | PPI       |

PP. Pehe ...

| NO   | NAMA PELABUHAN  | PROPINSI       | KOTA/KABUPATEN        | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                 |                |                       | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                 |                |                       | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1099 | PP. Pehe        | Sulawesi Utara | Kab. Kep. Sitaro      | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1100 | PP. Bahoi       | Sulawesi Utara | Kab. Kep. Sitaro      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1101 | PP. Ulu         | Sulawesi Utara | Kab. Kep. Sitaro      | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1102 | PP. Rainis      | Sulawesi Utara | Kab. Kep. Talaud      | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1103 | PP. Salibabu    | Sulawesi Utara | Kab. Kep. Talaud      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1104 | PP. Amurang     | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1105 | PP. Rap Rap     | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Selatan | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1106 | PP. Dagho       | Sulawesi Utara | Kab. Sangihe Talaud   | PPP                               | PPP       | PPP       | PPP       |
| 1107 | PP. Tahuna      | Sulawesi Utara | Kab. Sangihe Talaud   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1108 | PP. Peta        | Sulawesi Utara | Kab. Sangihe Talaud   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1109 | PP. Kema        | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1110 | PP. Likupang    | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1111 | PP. Wori        | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara   | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1112 | PP. Gentuma     | Gorontalo      | Kab. Gorontalo Utara  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1113 | PP. Kwandang    | Gorontalo      | Kab. Gorontalo Utara  | PPN                               | PPN       | PPN       | PPN       |
| 1114 | PP. Tolinggula  | Gorontalo      | Kab. Gorontalo Utara  | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1115 | PP. Sumalata    | Gorontalo      | Kab. Gorontalo Utara  | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| X    | WPPNRI 717      |                |                       |                                   |           |           |           |
| 1116 | PP. Biak        | Papua          | Kab. Biak Numfor      | PPI                               | PPP       | PPN       | PPS       |
| 1117 | PP. Dotir       | Papua Barat    | Kab. Teluk Wondama    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1118 | PP. Wasior      | Papua Barat    | Kab. Teluk Wondama    | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1119 | PP. Sanggeng    | Papua Barat    | Kab. Manokwari        | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1120 | PP. Hamadi      | Papua          | Kota Jayapura         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1121 | PP. Tanjung Ria | Papua          | Kota Jayapura         | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1122 | PP. Fandoi      | Papua          | Kab. Biak Numfor      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1123 | PP. Korem       | Papua          | Kab. Biak Numfor      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1124 | PP. Sauribu     | Papua          | Kab. Biak Numfor      | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

PP. Wadibu ...



| NO   | NAMA PELABUHAN    | PROPINSI    | KOTA/KABUPATEN         | RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM |           |           |           |
|------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                   |             |                        | 5 TAHUN                           | 10 TAHUN  | 20 TAHUN  |           |
|      |                   |             |                        | 2015-2019                         | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1125 | PP. Wadibu        | Papua       | Kab. Biak Numfor       | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1126 | PP. Waharia       | Papua       | Kab. Nabire            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1127 | PP. Waiya Depapre | Papua       | Kab. Jayapura          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1128 | PP. Demta         | Papua       | Kab. Jayapura          | -                                 | -         | PPI       | PPI       |
| 1129 | PP. Waropen       | Papua       | Kab. Waropen           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| XI   | WPPNRI 718        |             |                        |                                   |           |           |           |
| 1130 | PP. Dobo          | Maluku      | Kab. Kep. Aru          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1131 | PP. Kalar Kalar   | Maluku      | Kab. Kep. Aru          | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1132 | PP. Klishatu      | Maluku      | Kab. Maluku Barat Daya | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1133 | PP. Adijaya       | Papua Barat | Kab. Kaimana           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1134 | PP. Merauke       | Papua       | Kab. Merauke           | PPI                               | PPP       | PPN       | PPS       |
| 1135 | PP. Omor          | Papua       | Kab. Asmat             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1136 | PP. Poumako       | Papua       | Kab. Mimika            | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1137 | PP. Sumuraman     | Papua       | Kab. Mappi             | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1138 | PP. Sungai Bian   | Papua       | Kab. Merauke           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |
| 1139 | PP. Wanam         | Papua       | Kab. Merauke           | PPI                               | PPI       | PPI       | PPI       |

Berdasarkan ...

Berdasarkan lokasi dan jumlah pelabuhan perikanan tersebut, dapat disampaikan gambaran secara umum jumlah lokasi pelabuhan perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

| Periode   | Kelas |     |     |      |                  | Total |
|-----------|-------|-----|-----|------|------------------|-------|
|           | PPS   | PPN | PPP | PPI  | Belum Ada Status |       |
| 2015-2019 | 6     | 15  | 45  | 936  | 137              | 1139  |
| 2020-2024 | 6     | 15  | 51  | 969  | 98               | 1139  |
| 2025-2029 | 9     | 16  | 51  | 1063 | -                | 1139  |
| 2030-2034 | 15    | 18  | 49  | 1057 | -                | 1139  |

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa rencana induk pelabuhan perikanan ke depan pelaksanaannya diarahkan untuk meningkatkan fasilitas dan operasional sehingga rencana pelabuhan perikanan dapat ditetapkan dan ditingkatkan statusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan lokasi dan jumlah pelabuhan perikanan tersebut, dapat disampaikan gambaran secara umum jumlah lokasi pelabuhan perikanan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

| WPPNRI     | JUMLAH PELABUHAN PERIKANAN |
|------------|----------------------------|
| WPPNRI 571 | 88                         |
| WPPNRI 572 | 220                        |
| WPPNRI 573 | 167                        |
| WPPNRI 711 | 103                        |
| WPPNRI 712 | 224                        |
| WPPNRI 713 | 134                        |
| WPPNRI 714 | 51                         |
| WPPNRI 715 | 81                         |
| WPPNRI 716 | 47                         |
| WPPNRI 717 | 14                         |
| WPPNRI 718 | 10                         |
| Total      | 1139                       |

#### E. Pembiayaan Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan merupakan tanggung jawab Kementerian, pemerintah daerah, dan swasta. Sumber pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan ...

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan pihak swasta. Perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan per lima tahun adalah sebagai berikut:

| Periode         | Juta (USD) |
|-----------------|------------|
| 2015-2019       | 1.193,750  |
| 2020-2024       | 1.240,625  |
| 2025-2029       | 1.370,208  |
| 2030-2034       | 1.430,625  |
| Total Kebutuhan | 5.235,208  |

## BAB IV PENUTUP

Rencana induk pelabuhan perikanan nasional yang berisi kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan merupakan acuan dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dalam rangka pembangunan ekonomi secara bangsa.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari perencanaan sampai dengan melaksanakan pembangunan dan operasionalisasi pelabuhan perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono

